

**AKIBAT HUKUM BAGI AHLI WARIS YANG
BERPINDAH AGAMA DALAM PEWARISAN
MENURUT HUKUM ADAT BALI
(Studi Kasus di Banjar Adat Tuka dan Untal – untal
Desa Dalung Kabupaten Badung Propinsi Bali)**



**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Kenotariatan**

**Disusun :
KARDINAL MASWIBAWA, SH
B4B 002 124**

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2004

HALAMAN PENGESAHAN

AKIBAT HUKUM BAGI AHLI WARIS YANG
BERPINDAH AGAMA DALAM PEWARISAN
MENURUT HUKUM ADAT BALI
(Studi kasus di Banjar Adat Tuka dan Untal – untal Desa
Dalung Kabupaten Badung Propinsi Bali)

Disusun oleh

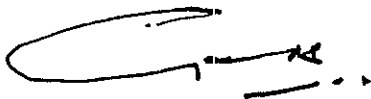
Kardinal Maswibawa, SH.

NIM : B4B 002 124

Telah dipertahankan di depan tim penguji
pada tanggal, 9 September 2004
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

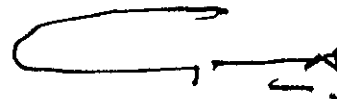
Menyetujui,
Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama



Prof. IGN. Sugangga, SH.
NIP. 130359063

Ketua Program



Prof. IGN. Sugangga, SH.
NIP. 130359063

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 13 Agustus 2004

Kardinal Maswibawa, SH.

NIM : B4B 002 124

BIODATA

NAMA : KARDINAL MASWIBAWA

ALAMAT : JL. CEKOMARIA Gg BUAYA NO : 9
DENPASAR

ALAMAT SEKARANG : JL. ANGREK VIII/22 SEMARANG

TEMPAT/TANGGAL LAHIR : SINGARAJA / 29 JULI 1976

AGAMA : HINDU

JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI

PENDIDIKAN : 1995-2002 => FAKULTAS HUKUM
UNIV.UDAYANA

1992-1994 => SMA 4 DENPASAR

1989-1992 => SMP NEGERI NEGARA

1982-1989 => SD NEGERI I BALER BALE
AGUNG NEGARA

1980-1982 => TAMAN KANAK-KANAK
IIP JAKARTA SELATAN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul “AKIBAT HUKUM BAGI AHLI WARIS YANG BERPINDAH AGAMA DALAM PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT BALI”. Studi kasus di Banjar adat Tuka dan Untal-untal desa Dalung Kabupaten Badung Propinsi Bali.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan pihak lain, tesis ini tidak mungkin dapat terselesaikan. Oleh karena itu pada kesempatan ini perkenankan penulis menghaturkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Ir. Eko. Budiharjo, Msc, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. IGN Sugangga SH beserta keluarga selaku ketua program studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro serta pembimbing utama dalam penulisan tesis ini yang telah banyak meluangkan waktu selama menyelesaikan studi di Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak R. Suharto, SH, MHum, selaku sekretaris Program Magister Kenotariatan UNDIP.
4. Ibu Hj. Budi Gutami SH, MHum, selaku dosen wali penulis pada program studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

5. Seluruh tim Review proposal tesis yang telah memberikan pengarahan dan petunjuknya dalam penulisan tesis ini.
6. Bapak Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, SH, MHum beserta keluarga yang telah banyak membantu selama penulis menyelesaikan studi di Magister Kenotariatan.
7. Segenap Dosen dan staff pengajar program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
8. Segenap Staff dan Karyawan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
9. Bapak Kepala Desa Dalung, Bapak Kelian dinas Untal-untal dan Tuka, beserta Bapak Kelian adat Desa Dalung dan Untal-untal dan seluruh masyarakat Desa Dalung yang telah ikut berpartisipasi membantu penulis selama penelitian.
10. Bapak Ketut Ngastawan dan Bapak Victor atas dukungan selama ini.
11. Bapak I Made Pada atas segala bantuan dan dukungannya selama penulis menyelesaikan Studi di Magister Kenotariatan.
12. Bapak Rai Adnyana, Bapak Rai Sugira, Bapak Prof. Sirtha dan semua Responden yang telah membantu penulis dalam penyusunan tesis ini.
13. Bapak I Putu Gelgel, SH, MHum yang telah meluangkan waktu dan sumbangan pemikirannya didalam penyusunan tesis ini.
14. Kedua orang tua tercinta, Guru K.P Sidharta dan Mamah Ni Wayan Sulendri beserta kakakku Dektu, Ririn, Tutik serta Rani yang telah

memberikan dukungan moril dan materiil serta do'a-do'anya selama menyelesaikan studi di Semarang.

15. Ika Ayuningtyas atas segala bantuannya selama ini di Semarang.

16. Mbak Santi, Nyoman, Yanti, Ibu Kermayanti dan seluruh teman-teman dan pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan selama ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini belum sempurna baik dalam bentuk maupun isinya untuk itu semua kritik dan saran dalam rangka penyempurnaan tesis ini sangat penulis harapkan

Akhirnya agar penulisan ini dapat menjadi bagian yang berarti bagi banyak pihak .

Semarang, Agustus 2004

Penulis

Kardinal Maswibawa, SH.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Pernyataan	iii
Biodata	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	viii
Abstraksi	xi
Abstraction	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Kegunaan Penelitian	5
1.5. Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Hukum Kesanaksaudaraan/ Hukum Kekeluargaan	
di Bali	7
2.1.1. Garis Kebapaan di Bali	7
2.1.2. Hubungan Anak Terhadap Orang Tua	10
2.1.3. Hubungan Anak Terhadap Keluarga	10
2.1.4. Kedudukan Anak Kandung Laki-laki	11

2.1.5.	Kedudukan Anak Kandung Perempuan	12
2.2.	Pengertian Hukum Adat Dan Hukum Waris Adat	13
2.2.1.	Pengertian Hukum adat	13
2.2.2.	Pengertian Hukum Waris Adat	15
2.3.	Pewarisan	18
2.3.1.	Pengertian Pewarisan	18
2.3.2.	Sistem Pewarisan Dalam Hukum Waris Adat	23
2.3.3.	Macam-macam Harta Warisan Menurut Hukum Adat	29
2.4.	Kedudukan Ahli Waris menurut Hukum Adat Bali	31
2.4.1.	Ahli Waris Yang Berhak Mewarisi	31
2.4.2.	Ahli Waris Yang Tidak Berhak Mewarisi.....	33
2.4.3.	Hak Dan Kewajiban Ahli Waris Dalam Hukum Adat Bali	35
BAB III	METODE PENELITIAN	40
3.1.	Metode Pendekatan	40
3.2.	Spesifikasi Penelitian	40
3.3.	Jenis Penelitian	40
3.4.	Populasi dan Metode Sampling	41
3.5.	Teknik Pengumpulan Data	42
3.6.	Teknik Analisa Data	43
3.7.	Lokasi Penelitian	44

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
4.1.	Hasil Penelitian	45
4.2.	Kedudukan Ahli Waris yang Berpindah Agama	51
4.2.1.	Kedudukan Hukum Ahli Waris Yang Berpindah Agama Terhadap Hak Mewaris Menurut Hukum Adat Bali	51
4.2.2.	Tanggung Jawab Ahli Waris Yang Berpindah Agama dalam Pewarisan menurut Hukum Adat Bali	61
4.3.	Macam-macam Dan Alasan Pemberian Harta Warisan Bagi Pewaris Yang Berpindah Agama	64
BAB V	PENUTUP	70
5.1.	Kesimpulan	70
5.2.	Saran-saran	71

Daftar Pustaka

Lampiran

**AKIBAT HUKUM BAGI AHLI WARIS YANG BERPINDAH AGAMA
DALAM PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT BALI
(Studi Kasus di Banjar Adat Untal-Untal dan Tuka Desa Dalung
Kabupaten Bandung Propinsi Bali)**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum serta tanggung jawab ahli waris yang berpindah agama dalam pewarisan menurut hukum adat Bali. Seseorang yang berpindah agama menurut hukum adat Bali dan hukum kekeluargaan patrilineal di Bali menunjukkan bahwa ia tidak ada lagi hubungannya dengan masalah penerusan (silsilah keluarga) dan tidak sebagai penerima hak dan kewajiban dari pewaris, yang tidak dapat dipisahkan dari kewajiban dalam bidang keagamaan (Hindu) yang meliputi upacara sembah kepada leluhur atau pewaris pada saat upacara pengabenan (pembakaran mayat) serta keikutsertaannya didalam melaksanakan pemeliharaan serta upacara di “Merajan” untuk lingkungan keluarga dan tempat suci lainnya seperti Khayangan Tiga.

Responden dipilih secara non random sampling dengan cara purposive snow ball sebanyak 25 orang yang telah melakukan perpindahan agama. Penelitian ini adalah merupakan penelitian yuridis empiris dan bersifat deskriptif analitis dimana hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran tentang akibat hukum dan tanggung jawab ahli waris yang telah melakukan perpindahan agama. Data primer dan data sekunder ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan lapangan dengan alat pengumpulan data studi dokumen maupun pedoman wawancara.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ahli waris yang telah berpindah agama masih tetap mewaris dan mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga asalnya walaupun ia hanya dapat mewaris harta tertentu saja di keluarga asalnya tersebut berupa harta gono-gini, tetadaan dan jiwa dana.

**THE LEGAL CONSEQUENCES FOR THE INHERITANCE WHICH
TRANSRELIGION FOR THE RIGHT OF INHERITANCE IN THE
CUSTOMARY OF BALI**

**(Study Cases In Banjar Adat Tuka And Untal-Untal In Dalung Village In
The Badung Regency Of Bali)**

ABSTRACT

The purpose of this research is to know how the position according to the law and responsibility the inheritance which transreligion in the legacy in the customary of Bali. Each person who transreligion according to the customary law of Bali and Patrilineal law in Bali shows that he doesn't longer had connection with genealogical-tree and not as receiver the rights and responsibility from being the joint heirs, which is unseparated-able from religious dimension (Hindu) including ancestor worshipping ceremony or inherited in ngaben ceremony (cremation) and his participation in care and ceremony in "Merajan" for relatives and other holy places like "third heaven".

The responden was non randomly picked up with the purposive snow ball way was 25 person from Dalung vilager which had the transreligion. This research was juridical and empirical research and descriptively and analitical which has result taken from this research which expected can describe about the position and responsibility the inheritance who had the transreligion. The primary and secondary data collected in literature-way and field research with paper collected tools and interview.

From the result of the research shows that the inheritance who had the transreligion still had the rights and had the responsibility to the family even he can only inherit the certain property from his family.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Guna memenuhi kebutuhan hukum bagi masyarakat Indonesia maka dalam penyusunan hukum nasional diperlukan adanya asas-asas hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia yaitu hukum adat. Hukum adat adalah salah satu sumber penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan hukum nasional.

Oleh karena itu, hukum adat menempati posisi yang penting dalam kerangka dan proses pembangunan hukum nasional terutama ditujukan pada unifikasi hukum, namun demikian hal ini bukan berarti bahwa semua materi hukum adat dapat ditransformasi ke dalam hukum nasional, sebagaimana dinyatakan oleh Bushar Muhammad bahwa:

“Dalam mengumpulkan bahan-bahan dari penyidikan hukum adat (dan etnografi) itu, maka sikap kita menghadapi bahan-bahan tersebut haruslah ada dua segi yaitu segi yang negatif dan satu segi yang positif. Yang dimaksud segi negatif ialah bahwa sejak permulaannya segera kita memisahkan lembaga-lembaga adat yang tidak bisa diturut sertakan dalam meningkatkan taraf penghidupan bangsa Indonesia yang hendak disesuaikan dengan tingkat kemajuan dari dunia modern atau lembaga-lembaga hukum adat yang menurut ukuran peri kemanusiaan tidak dapat dipertahankan dalam kehidupan masyarakat modern”¹

Ketetapan MPR/IV/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara dalam arah kebijakannya menegaskan bahwa menata sistem hukum nasional yang terarah dan terpadu adalah dengan menghormati hukum

agama dan hukum adat serta memperbaharui undang-undang warisan kolonial. Salah satu arah kebijakan dalam bidang agama adalah mengupayakan agar segala peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan moral agama.

Tujuan nasional sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 diwujudkan melalui pelaksanaan negara yang berkedaulatan rakyat dan demokratis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Pembangunan nasional itu harus dilaksanakan dalam segala bidang, baik dalam bidang spiritual telah pula diatur dalam penjabaran lebih lanjut dari Pancasila yaitu dalam pasal 29 Undang-undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa:

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Maka tiap-tiap penduduk dijamin secara hukum bahwa ia adalah bebas untuk memeluk agama dan kepercayaannya”

Penjelasan Bab II angka I Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No.II/MPR/1978) yang menyatakan: Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Kebebasan beragama adalah merupakan salah satu hak asasi diantara hak-hak asasi manusia, karena kebebasan beragama itu langsung bersumber kepada

¹ Soerjono Soekanto dan Soleman B Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1983, hlm. 91.

martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hak kebebasan beragama bukan pemberian negara atau pemberian golongan².

Dengan demikian jelaslah bahwa negara telah memberikan keleluasaan dan kesempatan bagi setiap penduduk untuk mengejar kebahagiaan spiritual berdasarkan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Negara menyediakan dan membantu sepenuhnya sarana untuk mencapai kebahagiaan spiritual itu dengan membangun sarana persembahyangan seperti Pura bagi umat Hindu, Masjid bagi umat Islam, Gereja bagi umat Kristen dan Katholik, serta Wihara bagi umat Budha. Ini berarti negara menjamin kebebasan warga negaranya untuk memilih dan memeluk agama yang diyakininya.

Di Bali, sering terjadi suatu peralihan agama oleh seorang ahli waris, yang semula beragama Hindu ke agama lain yang diyakininya. Sehingga menyebabkan adanya perbedaan agama antara ahli waris dengan si pewaris yang nantinya akan terkait dengan proses pewarisan. Masyarakat Hindu di Bali yang dalam hidup dan kehidupannya, termasuk juga dalam hal waris diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum adat Bali.

Peralihan atau perpindahan agama oleh ahli waris seperti tersebut di atas, akan menimbulkan suatu permasalahan di kemudian hari. Dalam Hukum Adat Bali, ahli waris disamping memiliki hak untuk mewaris, juga memiliki kewajiban-kewajiban yang melekat padanya. Kewajiban tersebut biasanya terkait dengan masalah: keanggotaannya dalam Desa Adat,

² Pudja, *Hukum Kewarisan Hindu yang Diresifir ke dalam Hukum Adat di Bali dan Lombok*, Selekt Group, Jakarta, 1977, hlm. 5.

penguburan dan pengabenan orang tua, hutang yang ditinggalkan oleh pewaris, serta kewajiban-kewajiban agama dalam lingkungan keluarga.

Ahli waris yang beralih agama dari agama Hindu ke agama lain, tidak dapat mengikuti pelaksanaan upacara penguburan dan pengabenan orang tuanya karena hal ini terkait dengan perbedaan agama yang dianut. Sebagaimana diketahui bahwa dalam upacara pengabenan terdapat upacara *sembah* dengan tatacara sesuai dengan ajaran Agama Hindu. Sehingga ahli waris yang berpindah agama tersebut, tidak mungkin bisa melakukan kewajibannya untuk melakukan pengabenan orang tuanya.

Di dalam hukum waris adat Bali, bahwa seseorang yang telah melakukan perpindahan agama tidak akan mendapat warisan, namun di dalam kenyataannya di masyarakat ditemui ahli waris yang telah melakukan perpindahan agama mendapatkan warisan.

Mencermati persoalan tersebut di atas, maka dipandang perlu melakukan suatu penelitian tentang akibat hukum bagi ahli waris yang berpindah agama dari pewaris dalam masyarakat Hindu di Bali.

1.2 Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut di atas, masalah yang diangkat dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum ahli waris yang berpindah agama dari pewaris, terhadap hak mewaris menurut Hukum Waris Adat Bali ?

2. Bagaimana tanggung jawab ahli waris yang berpindah agama dalam pewarisan menurut Hukum Waris Adat Bali ?
3. Apa dasar pemberian harta warisan kepada ahli waris yang berpindah agama tersebut dan meliputi harta apa saja ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji tentang kedudukan hukum ahli waris yang berpindah agama dari pewaris, terhadap hak mewaris menurut Hukum Waris Adat Bali.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji tentang tanggung jawab ahli waris yang berpindah agama dalam pewarisan menurut Hukum Waris Adat Bali.
3. Untuk mengetahui dasar pemberian harta warisan kepada ahli waris yang berpindah agama.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum, khususnya dalam Hukum Waris Adat Bali.

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi tentang kedudukan ahli waris yang berpindah agama dari si pewaris dalam masyarakat hukum adat Bali.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan tesis ini peneliti merasa perlu adanya penulisan sistematika, sehingga dapat diketahui secara jelas kerangka dari isi tesis yang ditulis. Gambaran yang lebih jelas mengenai penulisan tesis ini akan diuraikan dalam sistematika berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan akan memuat didalamnya mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan pustaka akan membicarakan mengenai tinjauan umum mengenai hukum ksanaksaudaraan/ hukum kekeluargaan di Bali yang meliputi garis kebapaan di Bali, hubungan anak terhadap orang tua, hubungan anak terhadap keluarga, kedudukan anak kandung laki-laki, dan kedudukan anak kandung perempuan, tentang pengertian hukum adat dan hukum waris adat, tentang pewarisan yang meliputi pengertian pewaris, sistem pewarisan dalam hukum waris adat, dan macam-macam harta warisan menurut hukum adat serta tentang kedudukan ahli waris menurut hukum adat Bali yang meliputi

ahli waris yang berhak mewaris, ahli waris yang tidak berhak mewaris, dan hak dan kewajibannya dalam hukum adat Bali.

BAB III Metode Penelitian yang meliputi metode pendekatan, jenis penelitian, populasi dan metode sampling, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan lokasi penelitian.

BAB IV Hasil penelitian dan pembahasan, akan membicarakan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi kedudukan ahli waris yang berpindah agama dalam pewarisan menurut hukum adat Bali

BAB V Penutup, akan membuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.

Dari akan diakhiri dengan lampiran-lampiran yang terkait dengan hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Hukum Kesanaksaudaraan/ Hukum Kekeluargaan di Bali

2.1.1. Garis Kebapaan di Bali

Kehidupan manusia yang berbudaya tentunya tidak akan terlepas dari sejarah perkembangan keluarga, sebagaimana bahwa di seluruh Indonesia pada tingkatan rakyat ditemukan golongan-golongan yang bertingkah laku sebagai kesatuan terhadap dunia luar. Golongan itu mempunyai tata susunan yang tetap dan abadi, golongan-golongan tersebut mempunyai pengurus harta benda materiil dan daerah tertentu. Golongan-golongan tersebut diatas disebut persekutuan hukum.³

Persekutuan hukum Indonesia dapat dibagi atas dua golongan menurut dasar susunannya:

1. Yang berdasar pertalian suatu keturunan (genealogi), yaitu apabila soal apakah seseorang menjadi anggota persekutuan itu tergantung dari pertanyaan apakah orang itu masuk suatu keturunan yang sama. Dalam hal ini adalah tiga macam dasar pertalian keturunan yaitu:
 - a. Pertalian darah menurut garis bapak (patrilineal) misalnya pada orang-orang Batak, Nias dan orang-orang Sumba.

- b. Pertalian darah menurut garis ibu (matrilineal) misalnya famili Minangkabau, dan
 - c. Pertalian darah menurut garis ibu dan menurut garis bapak (tata susunan parental) misalnya orang-orang Jawa, Sunda, Aceh, Kalimantan. Untuk menentukan hak-hak dan kewajiban seseorang, maka famili dari pihak bapak adalah sama artinya dengan famili dari pihak ibu.
2. Persekutuan hukum adalah berdasarkan lingkungan daerah, apabila keanggotaan seseorang dari persekutuan itu tergantung dari soal apakah ia bertempat tinggal di dalam lingkungan daerah persekutuan itu atau tidak.⁴

Adapun di Bali mempunyai susunan patrilineal, keturunan dari pihak bapak (saking purusa), yang pada umumnya disebutkan dengan istilah *Tunggal dadiya* yang artinya mempunyai ketunggalan (satu) bapak leluhur atau sering disebut dengan ketunggalan silsilah. Ketunggalan silsilah itu dilacak (diurut) menurut garis bapak dan tidak saja beberapa generasi tetapi sampai berpuluh-puluh generasi ke atas.⁵

Masyarakat kekerabatan patrilineal yang mengutamakan garis keturunan menurut garis laki-laki berlaku adat perkawinan dengan pembayaran jujur. Setelah perkawinan, istri melepaskan kekeluargaan adat dari kerabat asalnya dan memasuki keluarga

³ Soeripto, *Beberapa Bab tentang Hukum Adat di Bali*, Fakultas Hukum Negeri Jember, Jember, 1973, hlm. 29.

⁴ Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 52.

⁵ Soepomo, *Ibid*, hlm. 33.

adat suaminya. Dalam hal ini hak dan kedudukan suami lebih tinggi dari hak dan kedudukan istri.

2.1.2. Hubungan Anak terhadap Orang Tua

Seorang anak dikatakan lahir sah bilamana lahir di dalam perkawinan yang sah diantara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Perkawinan yang sah pada masyarakat Hindu Bali ialah perkawinan yang telah diupacarakan menurut hukum adat agama.

Olah karenanya, maka sejak anak itu masih dalam kandungan hingga ia dilahirkan, bahkan kemudian dalam pertumbuhan selanjutnya, dalam masyarakat adat dapat banyak upacara-upacara adat yang sifatnya religio magis serta yang penyelenggaraannya berturut-turut mengikuti pertumbuhan fisik anak tersebut yang semuanya itu bertujuan melindungi anak beserta ibu yang mengandungnya dari segala bahaya dan gangguan-gangguan serta kelak setelah anak dilahirkan, supaya anak yang dimaksud dapat menjelma menjadi seorang anak yang dapat memenuhi harapan orang tuanya.⁶

2.1.3. Hubungan Anak terhadap Keluarga

Pada umumnya hubungan anak dengan keluarga ini sangat tergantung dari keadaan sosial dalam masyarakat yang

⁶ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Cetakan PT. Toko Gunung Agung, Jakarta, 1995, hlm.111.

bersangkutan.⁷ Sebagaimana telah diuraikan bahwa masyarakat Bali mempunyai sistem kekeluargaan yang patrilineal (kebapaan) yang membawa akibat bahwa hubungan anak dengan famili dari pihak bapak di dalam beberapa hal tertentu adalah berlainan dengan perhubungan diantara anak itu dengan famili dari pihak ibu. Golongan (pihak) laki-laki (para sameton saking purusa) mendapat tempat yang menonjol dibandingkan dengan golongan (pihak) ibu (para sameton saking pradana).⁸

2.1.4. Kedudukan Anak Kandung Laki-Laki

Berdasarkan ikatan kesanakaudaraan yang patrilineal, ahli waris di Bali adalah anak kandung laki-laki. Dalam hal tidak ada anak kandung laki-laki, ahli waris ialah orang yang diberi kedudukan sebagai anak kandung laki-laki, yaitu:

- a. Anak laki-laki yang diangkat yang berasal dari keluarga orang lain.
- b. Anak perempuan (biasanya anak perempuan tunggal) yang ditetapkan sebagai anak laki-laki yang disebut sentana rajeg.

Namun adakalanya anak lelaki pun bukan/ tidak menjadi ahli waris, yaitu dalam hal:

- a. Anak laki-laki yang diangkat anak oleh keluarga lain
- b. Anak laki-laki yang kawin nyeburin

⁷ *Ibid*, hlm.115.

c. Anak laki-laki yang tidak melaksanakan dharmaning anak yaitu:

1. Durhaka (drowoko) terhadap orang tua
2. Durhaka (drowoko) terhadap leluhur.

Pengutamaan garis keturunan laki-laki dalam hal ini ada hubungannya dengan kepercayaan bahwa anak laki-lakilah yang dapat membukakan jalan ke sorga untuk arwah orang tuanya/leluhurnya.

2.1.5. Kedudukan Anak Kandung perempuan

Mengenai kedudukan anak kandung perempuan di dalam hukum adat waris Bali. Jika dibandingkan anak laki-laki dapat dikatakan hak-haknya adalah kurang sesuai dengan sifat kekeluargaan yang patrilineal, yang berhak mewaris sebagai ahli waris hanya keturunan dari pihak laki-laki, dimana anak kandung perempuan ini hanya mempunyai hak untuk menikmati saja pemberian-pemberian dari orang tuanya selama ia belum kawin.

Namun apabila anak perempuan itu ingin mewarisi harta kekayaan orang tuanya termasuk harta pusaka yang ada di keluarga tersebut, ia dapat melakukan hal tersebut dengan cara ditetapkannya anak perempuan (tunggal) tersebut menjadi sentara rajeg yang nantinya akan melanjutkan keturunan dari ayahnya

⁸ Soeripto, *Op Cit*, hlm. 47.

karena ia berstatus laki-laki dan berstatus sebagai ahli waris penuh, selama ia tidak kehilangan hak tersebut karena :

- a. Ia kawin keluar
- b. Tidak menepati dharmaning anak perempuan (misalnya ia mengandung tanpa suami yang sah)

2.2. Pengertian Hukum Adat dan Hukum Waris Adat

2.2.1. Pengertian Hukum Adat

Menurut Soeryono Soekanto “hukum adat itu merupakan keseluruhan adat (yang tidak tertulis) dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan kebiasaan dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum”⁹ Sementara itu Ter Haar berpendapat hukum adat itu adalah “seluruh peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan dengan penuh wibawa, dan yang dalam pelaksanaannya ditetapkan begitu saja, artinya tanpa adanya keseluruhan peraturan yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat sama sekali”¹⁰

Sedangkan Soerojo Wignjodipuro berpendapat sebagai berikut:

“Bahwa sistem hukum adat bersendi atas dasar alam pikiran bangsa Indonesia yang barang tentu berlainan dengan alam pikiran yang menguasai hukum Barat. Memahami serta sadar akan hukum adat,

⁹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1983, Hlm. 283.

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, Hlm. 7.

orang harus menyelami dasar-dasar alam pikiran yang hidup dalam masyarakat Indonesia”¹¹

Berdasarkan uraian pendapat para sarjana diatas maka dapat disimpulkan bahwa hukum adat itu adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain. Merupakan keseluruhan kelaziman dan kebiasaan (kesusilaan) yang benar-benar hidup di masyarakat adat. Dipertahankannya kebiasaan dan kelaziman dan kebiasaan masyarakat adat, maka hal ini merupakan suatu peraturan yang mengenal sanksi. Sanksi atas pelanggaran ditetapkan dalam keputusan para penguasa adat. Penguasa adat yang dimaksud adalah mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat itu. Diantaranya adalah penghulu agama dan kepala adat.

Unsur-unsur dalam hukum adat dipengaruhi oleh unsur-unsur asli yaitu yang berupa kebiasaan maupun unsur-unsur keagamaan, walaupun pengaruh agama itu tidak begitu besar dan hanya di beberapa daerah saja. Jadi hukum adat adalah hukum asli yang tidak tertulis, yang berazaskan kebudayaan dan pandangan hidup bangsa Indonesia, yang berpedoman pada kehidupan sehari-hari masyarakat yang saling berinteraksi. Disamping bagian yang tidak tertulis dari hukum asli itu ada pula bagian yang tertulis yaitu piagam-piagam, perintah-perintah raja, patokan-patokan pada daun lontar. awig-awig dalam masyarakat adat Bali.

¹¹ Soerojo Winjodipoero, *Op Cit*, hlm.73

Hukum adat sangat dipengaruhi oleh alam pikiran dari masyarakat Indonesia. Individu merupakan bagian dari masyarakat yang saling ada ketergantungan. Dapat dikatakan bahwa individu adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan lingkungan masyarakat dimana mereka berada. Sifat-sifat hukum adat adalah mempunyai corak sebagai berikut:

- a) Mempunyai sifat kebersamaan atau komunal yang kuat, artinya manusia menurut hukum adat merupakan mahluk dalam ikatan masyarakat atau kemasyarakatan yang erat, rasa kebersamaan ini meliputi seluruh lapisan hukum adat.
- b) Mempunyai corak religius magis yang berhubungan erat dengan pandangan hidup alam Indonesia.
- c) Hukum adat meliputi alam pikiran serta kongkrit artinya hukum adat sangat memperhatikan banyak dan berulang-ulangnya hubungan hidup yang kongkrit yang menyebabkan satunya perkataan dan perbuatan
- d) Hukum adat mempunyai sifat yang visual artinya perubahan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat (tanda yang kelihatan) sebagai bukti penegasan atau yang akan dilakukan dalam waktu dekat.

2.2.2. Pengertian Hukum Waris Adat

Masyarakat Indonesia mengenal adanya tiga sistem hukum waris yaitu sistem hukum waris adat, sistem hukum waris Islam dan sistem waris menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Menurut Soepomo Hukum waris adat dirumuskan sebagai berikut:

“ Hukum yang memuat peraturan-peraturan mengatur proses penerusan dan pengoperan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya. Proses ini telah dimulai dalam waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi “*akuut*” oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting dan proses itu akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut ”¹².

Ter Haar berpendapat bahwa hukum waris adat merupakan

“ Hukum yang bertalian dengan proses aturan-aturan penurunan dan peralihan kekayaan materiil dan immaterial dari turunan ke turunan ”¹³. Sementara itu Iman Sudiyat dalam bukunya yang berjudul Hukum Adat Sketsa Asas mengemukakan bahwa Hukum waris adat adalah aturan-aturan dan keputusan-keputusan hukum yang bertalian dengan proses penerusan atau pengoperan dan peralihan atau perpindahan harta kekayaan materiil dan non materiil dari generasi ke generasi.¹⁴

¹² Soepomo, *Op Cit*, hlm. 79.

¹³ Ter Har. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, diterjemahkan oleh Soebekti Poesponoto, Pradnya paramita, Jakarta, 1986, hlm. 231.

¹⁴ Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm. 151.

Hukum Waris Adat mempunyai keistimewaan tersendiri, karena harta warisan sudah dapat dipindahkan, atau beralih maupun dioperkan kepada yang berhak menerimanya berdasarkan hukum, pada waktu pewaris masih hidup dan pada umumnya tatkala pewaris sudah tua (tida kuat bekerja lagi). Hal inilah yang membedakan Hukum Waris Adat dengan BW (*Bur-gerlijk Wetboek*).¹⁵

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum waris adat itu meliputi keseluruhan asas, norma dan keputusan hukum yang bertalian dengan proses penurunan serta pengalihan harta benda materiil maupun immaterial dari generasi ke generasi berikutnya. Disamping itu hukum waris adat tidak hanya mengatur pewarisan akibat kematian seseorang saja, melainkan juga mengatur pewarisan sebagai akibat pengalihan harta kekayaan yang berwujud maupun tidak berwujud. Bernilai uang maupun yang tidak bernilai uang dari pewaris kepada ahli warisnya baik ketika pewaris masih hidup maupun sudah meninggal dunia.

Peralihan dalam proses pewarisan sudah dapat dimulai ketika pemilik harta kekayaan itu masih hidup dan proses tersebut berjalan terus sampai masing-masing keturunannya menjadi keluarga yang berdiri sendiri. Pada saatnya nanti ia juga akan

¹⁵ Sugangga, *Hukum Waris Adat*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, Hlm.9.

memperoleh giliran untuk meneruskan proses tersebut kepada generasi berikutnya. Meninggalnya orang tua, meninggalnya bapak atau ibu tidak akan mempengaruhi proses penurunan dan pengoperan harga benda tersebut.

Pelaksanaan proses pewarisan harus memperhatikan hubungan antara seorang yang meninggalkan warisan (pewaris) dengan penerima warisan serta harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris. Syaratnya harus ada hubungan kekeluargaan dari si pewaris dan ahli warisnya.

2.3. Pewarisan

2.3.1. Pengertian Pewarisan

Gde Puja membedakan istilah pewarisan dengan kewarisan, lebih lengkap diuraikan sebagai berikut:

“Pewarisan diterjemahkan dari istilah *“succession”* sedangkan istilah kewarisan diterjemahkan dari istilah *“inheritence”*. Keduanya merupakan istilah yang umum dalam rangkaian pembahasan berbagai aspek hukum waris. Kalau kita perhatikan dengan seksama kedua istilah itu, *inheritence* atau kewarisan menunjuk pada pengertian hukum materiil dalam hal waris mewaris sedangkan istilah *succession* atau pewarisan mencakup unsur pengertian hukum formil.”¹⁶

Pewarisan adalah hubungan hukum atau kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pewaris dengan ahli warisnya atau

¹⁶ Pudja, *Op Cit*, hlm. 64.

harta warisan yang ditinggalkan, baik setelah pewaris meninggal ataupun semasih pewaris itu masih hidup.¹⁷

Berdasarkan definisi di atas maka dalam pewarisan akan dapat dilihat dua subjek yang saling berkaitan dimana apabila salah satu subyek tidak ada, maka pelaksanaan pewarisan tidak akan terjadi. Adapun kedua subjek tersebut adalah orang pertama sebagai pemberi waris dan orang kedua sebagai penerima waris. Unsur-unsur ini sangat menunjang dalam proses pewarisan dan dalam pelaksanaannya.

Berkaitan dengan pewarisan, maka tidak akan terlepas dari sistem hukum waris adat Bali. Menurut Gde Pudja syarat sahnya pewarisan menurut hukum adat di Bali adalah:

- a) Antara pewaris dengan ahli warisnya terdapat adanya anak hubungan darah atau ditentukan oleh hukum, misalnya karena pengangkatan, adopsi dan lain-lain
- b) Agama ahli waris sama dengan agama si pewaris, atau ahli waris tidak kehilangan haknya misalnya beralih agama (meninggalkan keluarga), dibuang dari keluarga (*mapegat*) meninggalkan Dharma, dan lain-lainnya yang sejenis.
- c) Adanya pengaturan oleh hukum materiil yang dianutnya kecuali ditentukan lain, misalnya tidak ditemukan aturan-aturan itu kemudian dipergunakan penafsiran-penafsiran lain yang berdasarkan kedudukan dan kewenangan yang diberikan oleh hukum adat itu sendiri.¹⁸

Ketiga hal tersebut di atas akan memberi gambaran yang jelas kepada kita bahwa pengertian pewarisan, meliputi perubahan hak atas harta warisan dari pewaris kepada ahli warisnya karena sifat hubungan hukum yang mengaturnya.

¹⁷ *Ibid*, hlm.50.

Untuk dapat berlangsungnya suatu pewarisan maka harus ditunjang dengan adanya tiga hal pokok yaitu:

- a. Pewaris adalah orang yang meninggalkan warisan di dalam proses pewarisan
- b. Ahli waris adalah mereka yang berhak mendapatkan harta warisan yang ditentukan berdasarkan hubungan kekeluargaan dengan pewaris.
- c. Harta warisan adalah wujud kekayaan yang ditinggalkan pewaris.

Pewaris adalah orang yang memiliki harta kekayaan yang akan diteruskan atau akan dibagi-bagikan kepada ahli waris. Jadi pewaris adalah pemilik harta peninggalan. Dalam membahas tentang pewaris ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama adalah jika pewaris adalah orang tua, maka disini dapat ditelaah sejumlah hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua terhadap harta warisan. Kedua orang tua bertanggung jawab terhadap ahli waris sehubungan dengan harta warisan.

Sedangkan kalau bukan orang tua atau saudara, anak dan lain-lain maka akan kehilangan pula hak dan kewajiban dan tanggung jawab yang berbeda. Apabila pewaris itu adalah orang tua, maka kewajiban orang tua terhadap harta warisan dan juga ahli waris adalah soal upaya apa yang harus dilakukan oleh orang tua agar anak yang hidup dapat tumbuh dan terpelihara secara wajar. Dari segi immateriil pewaris (orang tua) wajib

¹⁸ *Ibid*, hlm.65.

melaksanakan kewajiban-kewajiban disamping menerima hak. Di dalam hukum adat Bali dapat dikemukakan contoh antara lain bahwa orang tua wajib melakukan upacara-upacara menyangkut kehidupan anaknya dan hal ini sering disebut hutang orang tua kepada anak. Orang tua disini harus berusaha untuk melunasi dalam bentuk upacara-upacara seperti *nelu bulanin* atau upacara pada umur tiga bulan bahkan sampai mengawinkan anak atau ahli warisnya.

Ditinjau dari hak pewaris (orang tua) maka dapat dilihat bahwa akhirnya harta warisan itu harus dipakai untuk amal oleh anak-anaknya. Amal yang dimaksud adalah dalam melakukan pengabenan atau melakukan upacara pembakaran jenazah orang tuanya. Terhadap kepentingan lain sedikit-tidaknya juga harus diambil dari harta warisan. Jadi dapat dikatakan bahwa mengabenkan jenazah orang tua itu adalah hak dari pewaris (orang tua). Jika pewaris bukan orang tua, misalnya saudara kandung sendiri maka tidak jelas adanya hubungan vertikal. Orang yang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak dan istri, maka harta warisan akan jatuh ke tangan saudaranya yang lain yang kemudian berkewajiban mengabenkan dan mengurus kepentingan yang lainnya. Apabila anak sebagai pewaris yang meninggalkan harta warisan dan orang tua sebagai ahli waris maka akan terdapat hak dan kewajiban yang berbeda terhadap warisan dari peninggalan

anak. Kewajiban mengabenkan disini dibebankan kepada orang tua terhadap anak yang meninggal terlebih dahulu.

2.3.2. Sistem Pewarisan dalam Hukum Waris Adat

Kehidupan manusia yang berbudaya tentunya tidak akan terlepas dari sejarah tentang perkembangan keluarga manusia itu sendiri. Manusia sadar bahwa antara ibu dan anak sebagai suatu kelompok inti dalam suatu masyarakat. Anak pada waktu itu hanya mengenal ibunya maka ibulah yang menjadi kepala keluarga. Kemudian timbul adat perkawinan exogami yang mengambil garis keturunan dari garis ibu. Proses perkembangan kelompok manusia ini dikenal dengan sebutan matriachat atau matrilineal. Selanjutnya ada suatu perubahan keadaan dimana kaum laki-laki mengambil calon dari kelompok dan keturunan yang diambil dari kelompok laki-laki disebut dengan patriachat atau patrilineal. Pada tingkat terakhir dalam perkembangan manusia, adat perkawinan di luar kelompok (exogami) berubah menjadi endogami yang menyebabkan anak akan berhubungan dengan anggota keluarga ayah dan ibunya. Pola kehidupan ini dikenal dengan nama susunan kekerabatan parental.¹⁹

Masyarakat bangsa Indonesia yang menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda mempunyai bentuk-bentuk dengan sistem keturunan yang berbeda-beda. Sistem keturunan ini sudah berlaku sejak dahulu kala sebelum masuknya ajaran agama Hindu, Islam dan Kristen. Sistem

¹⁹ Koentjaraningrat, *Pokok-pokok Antropologi Sosial*, PT. Intermasa, Jakarta, 1978. Hlm. 89.

keturunan yang berbeda-beda ini nampak pengaruhnya dalam sistem pewarisan hukum adat.

Secara teoritis sistem keturunan itu dapat dibedakan dalam tiga corak, yaitu:

- a) Sistem Patrilineal, yaitu keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari pada kedudukan perempuan dalam pewarisan.
- b) Sistem Matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, di mana kedudukan perempuan lebih menonjol pengaruhnya dari pada kedudukan pria dalam pewarisan.
- c) Sistem Parental atau Bilateral yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis di sisi bapak dan ibu, dimana kedudukan perempuan tidak dibedakan di dalam pewarisan.²⁰

Kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan memiliki hak yang sama dalam mewaris. Sistem pewarisan ini berlaku di kalangan masyarakat dengan sistem kekeluargaan parental. Anak laki-laki dan anak perempuan adalah sama haknya dalam mewaris, tidak berarti jenis atau harta warisan dibagi merata diantara semua ahli waris. Harta warisan itu tidak merupakan satu kesatuan yang dapat begitu saja dinilai harganya dengan uang. Begitu pula bagaimana pembagian itu kelak akan dilaksanakan tergantung pada keadaan harta dan ahli warisnya. Adanya kemungkinan ahli waris yang lemah ekonominya akan mendapat bagian yang lebih banyak dari ahli waris yang kuat ekonominya. Jika pewaris tidak punya anak sama sekali dan tidak pula anak angkat dari sanak saudaranya atau orang lain, maka harta warisan

²⁰ Hilman Hadikusuma, *Op Cit*, hlm.23.

akan diwarisi oleh anggota keluarga lainnya secara berurut menurut pengelompokannya.

Pewarisan pada anak perempuan berlaku pada sistem kekerabatan matrilineal. Suami setelah perkawinan mengikuti kedudukan istri atau tidak termasuk dalam kekerabatan suami. Apabila pewaris tidak mempunyai anak perempuan tetapi hanya mempunyai anak laki-laki saja, maka seorang anak laki-laki diambilkan perempuan sebagai istrinya dalam bentuk perkawinan semendo ngangkit. Seperti halnya dapat terjadi penyimpangan dalam kekerabatan patrilineal dimana pewaris memberi hibah/wasiat kepada anak perempuannya, demikian pula dalam kekerabatan matrilineal terjadi pewaris memberi hibah/wasiat kepada anak laki-laki dan pewaris ibu atau oleh pewaris ayah.

Apabila pewaris tidak punya keturunan sama sekali, maka pewaris mengangkat anak laki-laki dari saudara kandungnya laki-laki yang terdekat, demikian seterusnya sehingga hanya anak laki-laki yang menjadi ahli waris, dimana segala sesuatunya harus didasarkan musyawarah dan mufakat para anggota kerabat. Masyarakat patrilineal adalah suatu masyarakat yang terbagi dalam klan-kebaikan yang anggota-anggotanya menarik garis keturunan secara konsekwen dan berdasarkan pandangan yang bersifat religio magis melalui garis ayah atau laki-laki.

Sistem kekeluargaan patrilineal yang dianut masyarakat hukum adat Bali, mempengaruhi serta sekaligus menentukan pewarisan. Hal ini terbukti hanya anak laki-lakilah yang dianggap sebagai ahli waris dalam pandangan hukum adat Bali. Kenyataan ini selaras dengan pandangan Wiryono Prodjodikoro yang menyatakan bahwa sifat warisan pada suatu masyarakat tertentu adalah berhubungan erat dengan sifat kekeluargaan dalam masyarakat itu²¹. Hal ini yang membawa konsekwensi bahwa hanya anak laki-lakilah yang dipandang sebagai ahli waris yang berhak untuk mewarisi harta warisan yang ditinggalkan oleh si pewaris.

Patrilineal berasal dari kata *pater* yang berarti bapak atau ayah. Hal ini menandakan bahwa pertalian darah selalu dilihat menurut garis laki-laki. Menurut kepercayaan masyarakat Hindu di Bali apabila pasangan suami istri melahirkan anak, itu berarti mereka dapat menebus dosa-dosa yang ada pada leluhur mereka, yang istilah Balinya adalah *Nyupat*.

Penarikan garis keluarga seperti tersebut adalah hanya berhubungan dengan ahli waris yang akan mewarisi harta mewarisi harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Sebab kenyataan pula menunjukkan seperti halnya masyarakat adat Bali yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal dan memandang hanya anak laki-laki saja sebagai ahli waris. Di dalam

²¹ Atmadja, *Pengantar Hukum Kewarisan Adat Bali*, Staf LPPH Cabang Bali, Denpasar, 1981,

kenyataannya masyarakat Bali sendiri tidak hanya mengakui keturunan dari satu garis yaitu garis laki-laki saja. Anak perempuan adalah tetap diakui sebagai keturunannya dan tetap diakui sebagai saudaranya. Anak perempuan dalam sistem kekeluargaan patrilineal hanya diberikan hak untuk menikmati saja. Sebab menurut pandangan hukum waris adat Bali perempuan bukanlah ahli waris. Perempuan dapat menjadi ahli waris apabila statusnya diangkat menjadi anak laki-laki secara yuridis yang dikenal dengan istilah *sentana rajeg*.

Sistem kekeluargaan patrilineal yang dianut di Bali adalah pada dasarnya “bersumber pada hukum Hindu”. Hal ini dapat dilihat dalam sistem kekeluargaan di Bali yaitu yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal yang dalam masyarakat Bali dikenal dengan sistem “*Purusa*”. Sistem *purusa* adalah sistem yang bersumber pada hukum (agama) Hindu. Dasar sistem kekeluargaan patrilineal atau *purusa*, dapat dilihat di dalam Menawa Dharma Sastra Bab IX pasal 04 dan pasal 185 yang menyebutkan sebagai berikut:

1. Dalam ketentuan pasal 104 menyatakan bahwa: setelah meninggal ayah dan ibu, saudara-saudara (laki). Setelah berkumpul bersama mereka berbagi harta (orang tua), sesungguhnya tidak ada kekuasaan atas harta itu selagi orang

tua mereka masih hidup. Dari ketentuan pasal 104 Menawa Dharma Sastra tersebut, telah tersirat tentang sistem kekeluargaan patrilineal atau purusa yang dianut dalam masyarakat Bali.

2. Ketentuan pasal 185 Menawa Dharma Sastra menyebutkan sebagai berikut: Bukannya saudara (dari ayah), pun bukan ayah (dari pada ayah), melainkan anak laki-laknya sendirilah yang berhak atas harta warisan, ayah (dari pada ayah), hanya berhak atas harta warisan anaknya yang tidak berputra.

Sistem kekeluargaan yang dianut pada suatu masyarakat akan mempengaruhi pewarisan yang berlaku pada masyarakat tersebut. Sistem kewarisan hukum adat yang ada di Indonesia, antara lain adalah sistem kekeluargaan Patrilineal, sistem kekeluargaan Matrilineal dan sistem kekeluargaan Parental. Sistem kekeluargaan Parental merupakan sistem kekeluargaan campuran dari kedua sistem di atas yang sering juga disebut sistem kekeluargaan Bilateral. Sistem kekeluargaan tersebut sangat mempengaruhi dalam hal pewarisan, sebagai akibat lebih lanjut terdapat juga sistem kewarisan di dalam masyarakat Indonesia yaitu:

- a. Sistem kewarisan individual yaitu sistem kewarisan dimana para ahli mewarisi secara perorangan.
- b. Sistem kewarisan kolektif dimana para ahli waris secara bersama-sama mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi pemiliknya, kepada masing-masing ahli warisnya.
- c. Sistem kewarisan mayorat yaitu sistem kewarisan dimana harta warisan hanya diwarisi oleh anak laki-laki tertua saja. Apabila

yang mewarisi anak laki-laki tertua disebut mayorat laki, dan apabila yang mewarisi itu anak perempuan tertua disebut mayorat perempuan.²²

2.3.3. Macam-macam Harta Warisan menurut Hukum Adat

Harta warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh si pewaris kepada para ahli warisnya. Harta warisan dikenal dengan banyak nama dan bentuk harta warisan bukan hanya keuntungan dalam segi materi atau ekonomis saja, tetapi juga segala hutang-hutang dan kewajiban yang ditinggalkan oleh si pewaris.

Menurut ajaran agama Hindu harta warisan itu disebut dengan "*druwe tatamian*". Kata *druwe* (Jawa Kuno) berarti hak milik, sedangkan kata *tatamian* berarti peninggalan. Jadi *druwe tatamian* berarti peninggalan hak milik dari pewaris yang wafat untuk para waris yang masih hidup. Kata "*druwe*" (Bali) atau "*darbe*" (Jawa) berasal dari kata Sansekerta "*draviya*".²³

Masyarakat hukum adat di Bali menganut sistem kekerabatan patrilineal yang intinya bersumber pada ajaran agama Hindu dimana dalam hukum waris adat Bali dan hukum waris Hindu ada harta warisan yang tidak mempunyai nilai ekonomis melainkan mempunyai arti religius. Fungsi daripada pewaris menurut hukum adat Bali adalah mengatur dan memindahkan barang-barang materiil dan inmateriil dari pewaris kepada ahli waris, maka dalam hukum waris adat Bali sebagai refleksi dari

²² Astiti, *Laporan Penelitian tentang Unsur-unsur Agama yang Diterima sebagai Hukum Adat yang diterima di Bali*, Fakultas Hukum, Unud, 1984, hlm.51.

hukum Hindu, harta warisan itu dapat dibedakan menjadi tiga golongan :

1. Harta bawaan yaitu harta yang dibawa suami istri kedalam perkawinan sebagai bekal kedalam perkawinan yang bebas dan berdiri sendiri.

Harta bawaan menurut hukum waris adat Bali dibedakan atas :

- a. Harta gona kaya yaitu harta yang diperoleh suami istri masing-masing sebelum masuk ke jenjang perkawinan.
 - b. Harta jiwa dana yaitu pemberian secara tulus ikhlas dari orang tua kepada anaknya baik laki-laki maupun perempuan sebelum masuk perkawinan.
 - c. Harta tetatadan yaitu pemberian kepada anak perempuan pada waktu perkawinan dilangsungkan.
2. Harta bersama adalah semua pendapatan atau penghasilan suami istri selama perkawinan selain harta asal dan atau harta pemberian. Harta bersama dalam masyarakat Bali disebut Druwe Gabro.
 3. Harta Pusaka yaitu harta yang mempunyai nilai-nilai magis religius seperti *sanggah* dan *merajan* maupun barang-barang magis religius seperti *laba pura*, *tanah druwe tengah* serta barang-barang pusaka lainnya.

Druwe tengah adalah sisa harta pusaka yang telah

²³ Hilman Hadikusuma, *Op Cit*, hlm. 45.

dikurangi untuk biaya pengabenan, tetapi masih digunakan oleh anggota keluarga baik yang bernilai magis religius ataupun tidak. Tetapi jika ada ahli waris yang menuntut bagiannya dari sisa harta pusaka itu, dan ahli waris yang lain tidak berkeberatan, maka kepada ahli waris yang bersangkutan hanya diberikan bagian yang hanya diperuntukkan baginya, yaitu harta yang tidak bernilai magis religius.

Harta pusaka yang tidak boleh dibagi-bagi karena sifat dan tujuannya adalah harta yang telah disediakan untuk kepentingan keagamaan. Misalnya disediakan untuk membangun Pura, untuk membuat upacara keagamaan termasuk senjata seperti keris pusaka dan tombak pusaka. Harta tersebut dikuasai oleh satu atau beberapa anggota keluarga untuk kepentingan seluruh anggota keluarga.²⁴

2.4. Kedudukan Ahli Waris menurut Hukum Adat Bali

2.4.1. Ahli Waris yang Berhak Mewaris

Menurut hukum waris adat, proses pewarisan dalam masyarakat Hindu di Bali, harta warisan beralih dari pewaris kepada ahli waris yang sedarah atau yang ditunjuk oleh undang-undang. Menurut Gde Pudja, seorang ahli waris agar berhak mewarisi harta warisan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu sebagai berikut:

²⁴ *Ibid*, hlm.47.

- a. Ahli waris harus mempunyai hubungan darah, yaitu misalnya anak pewaris sendiri.
- b. Anak itu harus laki-laki. Bila tidak ada anak barulah jatuh kepada anak yang bukan sedarah yang karena hukum ia berhak sebagai ahli waris, misalnya anak angkat.
- c. Bila tidak ada anak dan tidak ada anak angkat, hukum waris adat membuka kemungkinan adanya penggantian melalui penggantinya atas kelompok ahli waris dengan hak keutamaan dengan hak pengganti lainnya yang memenuhi syarat menurut hukum adat.²⁵

Dalam sistem kekerabatan Patrilineal yang dianut oleh masyarakat Bali, yang berhak untuk menjadi ahli waris adalah anak laki-laki, ayah atau pihak ayah (saudara-saudara ayah). Sedangkan anak perempuan adalah bukan ahli waris. Tetapi dalam hal tertentu anak perempuan dapat pula berkedudukan sebagai ahli waris. Seorang anak perempuan bisa atau dapat mewarisi apabila dia diangkat statusnya menjadi anak laki-laki dan di Bali dikenal dengan istilah *rajeg*. Sentana *rajeg* adalah suatu tindakan yang pada hakekatnya menjadikan status anak perempuan menjadi anak laki-laki secara yuridis.

Keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki, melainkan hanya ada anak perempuan saja, berdasarkan hukum waris adat Bali diperkenankan oleh hukum untuk meningkatkan status anak perempuannya sebagai anak laki-laki. Upaya hukum ini timbul karena ada dua hal, yaitu :

1. Menurut Religio magis Hindu, hanya anak laki-laki saja yang dapat menyelamatkan arwah leluhur dan rohnya kelak bila sudah meninggal dunia. Berdasarkan pertimbangan ini maka

²⁵ Pudja, *Op Cit*, hlm.91.

perubahan status anak perempuan menjadi anak laki-laki bukan berdasarkan atas pertimbangan pewarisan melainkan atas dasar pertimbangan agamais.

2. Menurut hukum Hindu, perubahan status anak perempuan menjadi anak laki-laki bersifat formil dan tujuannya adalah untuk meneruskan dan melanjutkan garis keluarga. Jadi menyangkut hukum pewarisan inilah yang disebut hukum waris sentana dalam hukum waris adat, yang dasarnya adalah hukum Hindu. Akibat dari perubahan status anak perempuan menjadi anak laki-laki ini, maka status hukumnya pun berubah menjadi anak laki-laki.²⁶

Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Tjokorde Istri Putra Astiti, dalam laporan penelitian tentang unsur-unsur agama yang diterima sebagai saudara-saudara keturunannya laki-laki yang ditarik garis lurus ke atas dan ke bawah juga dapat berkedudukan sebagai ahli waris.

2.4.2. Ahli Waris yang Tidak Berhak Mewaris

Ahli waris adalah mereka yang karena kedudukannya terhadap pewaris berhak menduduki tempat pewaris atau harta bendanya, kecuali karena tingkah laku atau perbuatan hukum yang merugikan pewaris, sehingga kedudukan pewaris dapat dibatalkan berdasarkan hukum.

²⁶ *Ibid*, hlm.68.

Hukum waris adat Bali yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, seorang anak laki-laki yang berstatus ahli waris tidak akan menjadi ahli waris karena :

- a. Anak laki-laki yang kawin nyeburin,
- b. Anak laki-laki yang tidak melaksanakan darmaning

Misalnya :

- Durhaka (drowaka) terhadap leluhur.
- Durhaka (drowaka) terhadap orang tua.

- c. Sentana rajeg yang kawin keluar

Menurut hukum waris adat Bali, bahwa setiap ahli waris tidak berhak untuk menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh si pewaris seperti halnya tersebut di atas. Ahli waris ternyata melakukan perkawinan nyeburin yaitu anak laki-laki yang melakukan perkawinan di tempat tinggal mempelai perempuan, maka akan membawa suatu akibat hukum bahwa anak laki-laki tersebut akan berkedudukan sebagai perempuan atau "*predana*". Menurut hukum waris adat Bali anak perempuan tidak berhak mewaris. Hal ini dipandang sudah keluar dari rumpun keluarganya, karena sebagai akibat dianutnya sistem kekeluargaan patrilineal atau purusa.

Meninggalkan agama leluhur dianggap juga sebagai lenyapnya kedudukan mereka sebagai ahli waris. Kejadian inipun dapat dianggap kejadian durhaka terhadap leluhur karena sebagai akibat dari meninggalkan agama yang dianut oleh leluhurnya.

Mereka yang meninggalkan agama leluhurnya tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai kewajiban seorang anak (putra) terhadap leluhurnya. Peralihan agama didalam hukum Hindu dalam masyarakat adat Bali, dianggap menghalangi kedudukannya sebagai ahli waris.

Anak perempuan yang biasanya adalah anak perempuan tunggal dan menginginkan mewarisi harta kekayaan orang tuanya, maka anak perempuan tersebut dapat ditentukan sebagai sentana rajeg. Anak perempuan sebagai sentana rajeg ini yang nanti akan melanjutkan keturunan dari garis ayahnya. Sebagai sentana rajeg, statusnya sebagai ahli waris dapat gugur apabila ia melakukan kawin keluar.²⁷

2.4.3. Hak dan Kewajiban Ahli Waris dalam Hukum Adat Bali

Sesuai dengan apa yang telah dikemukakan di atas, bahwa sistem kekeluargaan yang dianut di Bali adalah sistem kekerabatan patrilineal, atau yang dikenal dengan istilah "purusa". Konsekuensinya bahwa hanya anak laki-laki sajalah yang dipandang sebagai ahli waris dan seorang perempuan hanya berhak untuk menikmati harta warisan yang ditinggalkan oleh si pewaris, sepanjang belum kawin keluar.

Di dalam pandangan hukum adat Bali seorang ahli waris, tidaklah semata-mata hanya mempunyai hak untuk mewarisi harta

²⁷ Soeripto, *Op Cit*, hlm.62.

warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, tetapi ahli waris juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakannya. Kenyataan hidup masyarakat adat Bali justru ahli waris akan lebih dahulu melaksanakan kewajibannya. Setelah kewajibannya terlaksana barulah akan memperhatikan apa yang menjadi haknya sebagai seorang ahli waris yaitu mewarisi harta yang ditinggalkan oleh pewaris.

Dalam hubungannya dengan wujud harta warisan tersebut, maka Ter Haar menyatakan bahwa :

“ Kewajiban-kewajiban untuk membayar hutang yang ada atau yang timbul diwaktu matinya atau karena matinya si peninggal warisan akhirnya termasuk juga bagian-bagian dari pada harta warisan peninggalan, walaupun ada juga sebagai bagian-bagian yang bersifat negatife ”.²⁸

Jadi dengan demikian ahli waris menurut pandangan hukum waris adat Bali adalah meninggalkan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Harta warisan itu adalah kekayaan materiil, dan sekaligus harta kekayaan itu adalah hutang-hutang. Di dalam harta peninggalan yang sifatnya negatif, maka sudah sewajarnya ahli waris menerima harta warisan itu meskipun harta warisan itu tidak ada nilai ekonomisnya.

Kewajiban-kewajiban ahli waris ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasuara 1900 yang menyebutkan sebagai berikut :

²⁸ Ter Har, *Op Cit*, hlm.215.

1. Barang siapa orang Bali Hindu meninggal,¹ dan ada harta bendanya. Kalau mempunyai hutang piutang, haruslah harta itu digunakan membayar hutangnya.
2. Jika ada sisanya lagi haruslah digunakan mengaben mayatnya menurut agama Hindu. Orang wajib kuasa dari yang mati dilarang membagi, gadaikan atau jual, harta benda itu apabila tiada digunakan mengabenkan mayatnya yang mati.²⁹

Nyatalah meskipun ditentukan oleh Ter Haar bahwa hutang-hutang termasuk harta peninggalan atau harta warisan yang ditinggalkan oleh si pewaris, kepada ahli warisnya dalam sifatnya yang negatif. Ketentuan Pasal 1 Pasuara Tahun 1900 menegaskan bahwa membayar hutang-hutang dari pewaris itu adalah merupakan kewajiban dari ahli waris itu. Jadi dengan demikian meskipun si pewaris tidak dapat memberikan harta warisan tetapi ahli waris adalah mempunyai kewajiban untuk melunasi hutang-hutang si pewaris.

Di dalam kenyataann masyarakat Bali, memang demikianlah adanya sesuai dengan apa yang ditentukan pasal 1 Pasuara tahun 1900. bilamana sipewaris meninggal dunia dan kemudian meninggalkan hutang-hutang, ahli waris kemudian akan berusaha untuk melunasi hutang-hutang tersebut sesuai dengan kemampuannya. Jadi berapapun miskinnya si pewaris bahkan

²⁹ Pasuara Tahun 1900.

mungkin yang akan diwariskan si pewaris adalah hutang-hutang belaka, maka hal ini tidaklah menimbulkan kewajiban ahli waris untuk melunasi hutang-hutang si pewaris. Dalam arti bahwa ahli waris adalah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar hutang-hutang yang ditinggalkan pewaris, terlepas dari apakah pewaris meninggalkan harta warisan yang mempunyai nilai ekonomis ataukah tidak.

Dari apa yang diuraikan dari ketentuan pasal 1 Pasuara Tahun 1900, maka dalam hal ini kemudian dapat diperinci secara lebih lanjut bahwa yang menjadi kewajiban-kewajiban dari ahli waris adalah sebagai berikut :

- a. Membayar hutang-hutang dari pewaris. Dalam hal ini baik hutang yang sekala (nyata) maupun yang sifatnya niskala (tidak nyata).
- b. Kemudian ahli waris juga mempunyai kewajiban untuk melaksanakan upacara “pengabenan mayat” si pewaris. Di dalam hal pewaris masih hidup ahli waris mempunyai kewajiban merawat, melakukan pengobatan terhadap sipewaris apabila sakit. Saat pewaris meninggal duniapun ahli waris melaksanakan kewajibannya yang telah ditentukan sesuai dengan pasal 1 Pasuara tahun 1900 yaitu melakukan pengabenan mayat si pewaris. Dalam melakukan pengabenan terhadap mayat si pewaris adalah tetap merupakan suatu

kewajiban dari ahli waris meskipun pewaris tidak dapat memberikan harta warisan kepada ahli waris yang bersifat ekonomis.

Demikian kewajiban-kewajiban utama dari ahli waris sesuai dengan apa yang ditentukan dalam ketentuan pasal 1 Pasuara Tahun 1900. Di dalam kenyataan hidup masyarakat di Bali selain kewajiban-kewajiban tersebut di atas, masih ada lagi kewajiban yang selayaknya masih harus pula dilaksanakan oleh seorang ahli waris sebagai perwujudan dharma baktinya kepada si pewaris. Ahli waris berkewajiban memelihara tempat pemujaan seperti *Sanggah Kemulan* atau *Pamerajan* dan berkewajiban membantu memelihara dan menyelenggarakan upacara di Khayangan Tiga. Jadi kewajiban-kewajiban ini meskipun tidak ditentukan dalam Pasuara pasal 1 tahun 1900, tetapi dalam kenyataan hidup masyarakat di Bali ternyata dilaksanakan sebagai suatu kewajiban mulia oleh ahli waris sebagai suatu perwujudan dharma baktinya kepada si pewaris dan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa. Kewajiban lain yang tidak kalah pentingnya adalah melaksanakan "*ayahan desa*" untuk melanjutkan apa yang sebelumnya telah dilaksanakan oleh si pewaris.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah metode *yuridis empiris*. Pendekatan yuridis adalah pendekatan dengan menitik beratkan berdasarkan peraturan atau ketentuan-ketentuan yang ada, sedangkan pendekatan empiris yaitu pendekatan dengan melakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati penerapan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat. Pendekatan empiris dipergunakan mengingat permasalahan yang diteliti mengangkat factor sosial kemasyarakatan.

3.2. Spersifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang akibat hukum dan tanggung jawab seorang ahli waris yang telah berpindah agama dalam pewarisan menurut hukum adat Bali.

3.3. Jenis Penelitian

Penelitian yang diselenggarakan ini adalah termasuk jenis penelitian empiris, yaitu penelitian yang menitik beratkan atau mengutamakan data

primer atau data lapangan.³⁰ Meskipun demikian guna melengkapi data primer dilakukan pula penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder sebagai pelengkap.

3.4. Populasi dan Metode Sampling

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat adat, pemuka adat dan instansi yang terkait, maka perlu di cari sampelnya, dimana penentuan sampel di tempuh dengan tehnik purposive sampling yaitu dengan menggunakan kriteria tertentu. Kriteria yang dimaksud adalah mengenai kedudukan ahli waris yang berpindah agama dari Hindu ke non Hindu yang telah melaksanakan pewarisan menurut hukum adat Bali yakni sebanyak dua puluh lima (25) orang responden.

Lima (5) orang nara sumber yang dianggap lebih tahu tentang ahli waris yang berpindah agama dalam pewarisan menurut hukum waris adat Bali, diantaranya terdiri dari:

1. Parisadha Hindu Dharma Bali adalah majelis umat Hindu tertinggi di Bali.
2. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah yang membawahi beberapa banjar atau wilayah desa.
3. Klian Adat adalah pengurus desa yang mempunyai kewenangan dalam hal mengambil keputusan-keputusan yang bersifat adat.

³⁰ Rony Hanitidjo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.121.

4. Klian Dinas adalah pengurus desa yang memiliki kewenangan dalam administrasi desa.
5. Bendesa Adat (Kepala Adat) adalah pengurus desa yang memiliki wewenang dalam bidang keagamaan dan adat.

3.5. Tehnik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penulisan ini dapat digolongkan menjadi 2 antara lain:

a. Data Primer (Data Lapangan)

Untuk data primer, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (interview) dengan menggunakan alat penelitian yang berupa daftar pertanyaan, dimana wawancara yang dilakukan secara langsung kepada nara sumber dengan pertimbangan mereka lebih mengetahui permasalahan yang berkaitan dengan kedudukan ahli waris yang berpindah agama dalam pewarisan menurut hukum adat Bali. Wawancara yang dilakukan tidak bersifat kaku dan tertutup melainkan bersifat terbuka dan selalu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Pedoman wawancara yang berupa daftar pertanyaan dimaksudkan untuk memudahkan pengendalian data, sehingga wawancara tidak melebar atau menyimpang dari kerangka yang ada.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan cara menelusuri dan melakukan analisa terhadap berbagai buku-buku literatur/kepuustakaan, laporan penelitian,

khususnya yang menyangkut tentang ketentuan-ketentuan yang ada kaitannya dengan kedudukan ahli waris yang berpindah agama dari pewaris menurut hukum adat Bali.

3.6. Analisa Data

Setelah penelitian dilakukan, maka data yang terkumpul baik data primer maupun data sekunder, kemudian dianalisa dengan melakukan pendekatan secara kualitatif dengan memperhatikan atau melakukan perbandingan antara data primer dan data sekunder tentang akibat hukum ahli waris yang berpindah agama dari pewaris menurut hukum adat Bali.

Dari data yang telah terkumpul, lalu data-data tersebut diproses melalui langkah-langkah yang bersifat umum yaitu:

- a. Reduksi data adalah data yang diperoleh di lapangan, ditulis/diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terperinci, laporan tersebut di reduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema atau polanya.
- b. Mengambil kesimpulan dan verifikasi.

Yaitu data yang telah terkumpul telah direduksi dan didisplay lalu berusaha untuk mencari maknanya, kemudian mencari pola, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya kemudian disimpulkan.³¹

³¹ Nasutian S, Metodologi Penelitian Kualitatif, hlm. 129.

3.7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Propinsi Bali dan sebagai sampel adalah Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Utara, Desa Dalung di Desa Adat Untal-untal dan Desa Adat Tuka dengan pertimbangan bahwa di tempat tersebut adalah paling banyak anggota masyarakat yang melakukan perpindahan agama.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Bagian dari bab IV ini akan dijelaskan mengenai:

1. Sejarah berdirinya Desa Dalung (tempat penelitian)
2. Demografi daerah penelitian
3. Jenis-jenis responden
4. Keadaan responden.

Ad. 1. Sejarah Berdirinya Desa Dalung (Tempat Penelitian)

Berbicara masalah sejarah adalah suatu pemikiran yang mengacu pada masa lampau, oleh karenanya pemaparan dalam hal sejarah merupakan penyampaian pesan tentang apa yang pernah terjadi pada masa lampau. Tujuan dalam hal pemaparan sejarah adalah sebagai bandingan pada masa sekarang dan sebagai cermin terhadap peristiwa masa yang akan datang. Di dalam sejarah yang lebih khusus yaitu sejarah desa, dimana dapat ditemukan dua kata yaitu sejarah dan desa. Kata sejarah dalam Bahasa Indonesia berasal dari Bahasa Melayu yang diambil alih dari kata Arab yaitu sejarah mengandung arti pohon, keturunan, asal-usul, silsilah, riwayat dan babad.

Sedangkan yang dinamakan desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkeluarga mengadakan

pemerintahan sendiri. Dari pengertian diatas maka masa lampau suatu desa tertentu sebagai bandingan pada masa sekarang dan sebagai gambaran peristiwa yang akan datang. Sebelum dibahas lebih lanjut mengenai daerah penelitian, maka akan diuraikan terlebih dahulu sejarah dari berdirinya desa tempat penelitian yaitu Desa Dalung sebagai berikut:

a. Sejarah berdirinya Desa Dalung

Sejarah atau babad desa Dalung menurut keterangan Bendesa Adat dalung, dikatakan bahwa Desa Dalung tidak dapat terlepas dari sejarah Padang Luwih, yang berdasar pada induknya yaitu sejarah Desa Mengwi. Sejak kerajaan Mengwi diperintah oleh Ida I Gusti Agung Nyoman Alangkajeng yang diberi gelar Ide Cokorde Munggu dan setelah mangkat diberi gelar Betara Andewata Ring Sor Ing Belimbing, memberikan kekuasaannya kepada salah seorang putranya yang bernama I Gusti Gede Meliling yang membangun Jero di Tebu Beneng dan berkuasa sampai ke Padang Luwih. Salah seorang putra I Gusti Made Meliling, bernama I Gusti Ngurah Gede Teguh diberi tempat tinggal di Padang Luwih. I Gusti Ngurah Gede Teguh mulai membangun tempat yang baru di sebelah barat sungai yeh poh yaitu di Banjar Teguh sekarang. Perpindahan ini terjadi karena sengketa antara putra I Gusti Gede Maliling yang bertempat tinggal di Tibubeneng dengan di Padang Luwih. Awal sengketa adalah berasal dari masalah pelebon atau Pengabenan almarhum I Gusti Gede Meliling oleh putranya yang bertempat tinggal di Tibubeneng, yang tidak memberitahukan akan upacara tersebut kepada I Gusti Ngurah Gede Teguh.

Kemudian Tibubeneng dihancurkan dan diserang oleh Putra Padang Luwih. Dengan adanya kejadian ini terjadi penyesalan dari putra-putra almarhum yang tinggal di Padang Luwih.

Berdasarkan petunjuk dan cerita orang tua yang dapat dipercaya, bahwa kata Dalung berasal dari kata “EDA LUNG” (Bahasa Bali) yang dalam bahasa Indonesianya diartikan “Jangan Patah” dan lama-kelamaan kata edelung menjadi Dalung.

Pembentukan Desa Dalung maupun yang memerintah pertama kali sejak tahun 1955 yang pada saat itu Desa Dalung diperintah oleh I Gusti Putu Naya sampai dengan tahun 1963. pada masa pemerintahannya terdapat penggabungan dua desa, yaitu desa Dalung dan desa Gaji menjadi satu desa yang bernama desa Dalung. Demikian juga dengan pembangunan desa, belum menampakkan kemajuan yang dirasakan oleh masyarakatnya. Hal ini disebabkan karena baru dirintis dan dilakukannya pembenahan-pembenahan terhadap desa dan masyarakatnya. Mulai tahun 1964 sampai dengan tahun 1982 Desa Dalung diperintah oleh I Gusti Rai Oka Bidja. Pada masa kepemimpinannya terjadi tragedi nasional yang menimpa Bangsa dan Negara Indonesia yang terkenal dengan Gerakan G.30 S / PKI.

Di bidang pemerintahan desa yang selama itu diatur oleh berbagai kebijakan daerah, menjadi sistem pemerintahan Desa Dalung yang disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa. Selama perkembangannya, desa Dalung mengalami banyak kemajuan di segala bidang sesuai dengan potensi desa yang ada.

Dari data yang tercatat pada tanggal 3 April 1993 pertumbuhan desa Dalung telah mencapai klasifikasi Tingkat Perkembangan Desa Swasembada dengan skor 148.

Ad. 2. Demografi Daerah Penelitian

Kabupaten Badung terdiri dari enam kecamatan, dari enam kecamatan dipilih kecamatan Kuta Utara di desa Dalung yang dalam penelitian paling banyak ditemukan kasus perpindahan agama.

Desa Dalung terdiri dari enam belas (16) Banjar yaitu:³² Banjar Tegal Jaya, Banjar Cekuk, Banjar Pendem, Banjar Gaji, Banjar Untal-untal, Banjar Kwanji, Banjar Tegeh, Banjar Kaja, Banjar Cepaka, Banjar Lebak, Banjar Kung, Banjar Padang Bali, Banjar Dukuh, Banjar Pengilian, Banjar Pagending dan Banjar Tuka.

Luas daerah desa Dalung adalah 615 Hektar dengan keadaan tanah baik tanah perumahan, tanah persawahan dan tanah tegalan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kelurahan Kapal
- Sebelah Timur : Kelurahan Sempidi
- Sebelah Selatan : Kelurahan Kerobokan
- Sebelah Barat : Desa Buduk

Pembagian Desa Adat di Bali berdasarkan pada *Tri Kahyangan* atau Pura Kahyangan Tiga, yang terdiri dari Pura Puseh, Pura Dalem dan Pura

³² Sumber data: *Monografi Desa Dalung*.

Bale Agung. Jumlah Desa Adat dalam suatu kelurahan bisa lebih dari satu desa adat tergantung pada *Tri Kahyangan* atau Pura Kahyangan Tiga yang terdapat pada desa tersebut. Jumlah kepala keluarga tiap-tiap banjar di desa tersebut rata-rata enam puluh kepala keluarga.

Oleh karena luasnya wilayah penelitian, maka peneliti membatasi wilayah penelitiannya yaitu untuk Kecamatan Kuta Utara diteliti Kelurahan / Desa Dalung, Banjar Untal-untal, dan Banjar Tuka. Berdasarkan keterangan Kelihan Dinas Banjar Tuka dan banjar Untal-untal disebutkan bahwa di Banjar Tuka ada 243 orang yang melakukan perpindahan agama yaitu dari agama Hindu ke agama Kristen baik Protestan maupun Katolik dari tahun 1971 sampai 2004. Sementara di Banjar Untal-untal yaitu di Kecamatan Kuta Utara, Desa Dalung, Banjar Untal-untal adalah sebanyak 24 orang.

Ad. 3. Jenis-jenis Responden

Responden yang dipilih terdiri dari: 25 (duapuluh lima) orang yang berpindah agama dari agama Hindu Bali ke agama lainnya (Protestan dan Katolik). Responden ini bertempat tinggal di Banjar Tuka 18 orang dan 7 orang di Banjar Untal-untal. Responden yang diambil (diwawancarai) adalah kepala keluarga dan anak laki-laknya yang sudah dewasa.

Ad. 4. Keadaan Responden

Mengenai masalah ini hanya akan dikemukakan keadaan responden yang berpindah agama. Untuk mendapat gambaran yang

lebih jelas dan lebih lengkap mengenai keadaan responden tersebut akan diuraikan mengenai; umur, pendidikan, dan pekerjaan responden.

Batasan umur yang dijadikan responden dalam penelitian ini yang termuda adalah 21 tahun. Pengelompokan umur responden tersebut di atas didasarkan bahwa pada umur tersebut responden sudah dewasa, sehingga dapat memberikan informasi yang akurat tentang perpindahan agama yang semula seagama dengan pewaris kemudian berpindah agama ke agama lain yang diyakini dan diperacayai. Pada umur 21 tahun responden dianggap mampu memberikan keterangan-keterangan yang berkaitan dengan perpindahan agama serta memberikan jawaban tentang konsekwensi yang ditimbulkan. Hal ini terkait dengan keterangan-keterangan yang dibutuhkan ahli waris yang berpindah agama dari pewaris dalam pewarisan menurut hukum adat Bali.

Pendidikan responden adalah terendah SD dan tertinggi SMU, mengenai pekerjaan responden sebagian besar adalah Petani, dan sebagian lagi Wirausaha dan Pegawai Negeri.

4.2. Kedudukan Ahli Waris yang Berpindah Agama Terhadap Pewarisan.

4.2.1. Kedudukan Hukum Ahli Waris yang Berpindah Agama Terhadap Hak Mewaris Menurut Hukum Adat Bali.

Menurut Hukum Adat Bali, seseorang yang berpindah agama akan kehilangan hak menjadi ahli waris, karena dianggap tidak dapat melaksanakan kewajiban dari seorang pewaris. Terhadap hal tersebut diatas tidak saja berlaku terhadap hak mewaris melainkan terhadap hubungan-hubungan hukum kekeluargaan masyarakat Hindu lainnya. Keadaan ini berlaku di Bali dari dahulu sampai sekarang secara konsekwen dan sampai sekarang masih dipertahankan. Walaupun demikian tidak jarang dijumpai di masyarakat, bagi pewaris yang masih hidup memberi kelonggaran terhadap hal diatas dengan jalan memberi bagian waris tertentu kepada anaknya yang berpindah agama dengan kriteria-kriteria bagian tertentu.

Kenyataan yang dijumpai di lapangan bahwa dari dua puluh lima (25) orang responden yaitu ahli waris yang berpindah agama mendapat bagian harta hanya sebatas *gonakaya* atau harta gono-gini pewaris. Prihal diatas ini dijumpai di desa Dalung Banjar Untal-untal, dan banjar tuka Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung. Berdasarkan hasil wawancara dengan Klian Dinas Banjar Untal-untal Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara, bahwa terhadap ahli waris yang berpindah agama (khususnya dari agama Hindu ke agama lainnya)

dikatakan bahwa yang bersangkutan tetap mendapatkan waris, karena para ahli waris tersebut, dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban baik terhadap diri pewaris maupun diluar diri pewaris. Sehingga sebagai konsekwensinya tetap mempunyai hak menerima harta warisan yang menjadi bagiannya.

Menurut pandangan dari Klian banjar Untal-untal bahwa sudah sewajarnya kita sebagai umat beragama untuk saling hormat menghormati, demi menjaga kerukunan. Dengan beralih agama maka berarti statusnya sebagai ahli waris lenyap, dan segala sesuatunya harus diselesaikan secara musyawarah mufakat dalam hal pemberian-pemberian terhadap harta kekayaan pewaris. Dalam kenyataannya apabila terjadi masalah dalam bidang pewarisan maka diusahakan menyelesaikan pembagian secara kekeluargaan dengan menyediakan pula bagian yang khusus untuk *sanggah* atau *pemerajan* untuk keperluan upacara-upacara.

Namun tidak demikian halnya di Bali yang mengenal adanya pembatasan-pembatasan tertentu dalam pembagian harta warisan, dimana dikenal adanya harta benda yang tidak boleh dibagi-bagi. Harta benda yang tidak boleh dibagi-bagi kepada ahli waris yaitu:

- a. Harta Pusaka yang mempunyai nilai religius magis
- b. Alat upacara di Sanggah Dadia Pemerajan atau Pura
- c. Keris pangentas atau senjata-senjata yang kepunyaan-kepuayaan keluarga

- d. Tanah bukti pemerajan, laba Putra yang pada hakekatnya ditujukan untuk kepentingan pemeliharaan.

Seperti apa yang telah diuraikan diatas, terhadap ahli waris yang meninggalkan agamanya diberi bagian hanya terhadap harta benda *pegunakaya* atau harta benda yang diperoleh orang tuanya selama perkawinan. Sejauhmana seorang ahli waris memperoleh hak atas harta benda *gunakaya* atau gono-gini orang tuanya dapat dikemukakan sebagai berikut: bahwa yang dapat diberikan sebagai pemberian adalah harta benda yang merupakan benda yang tidak dilekatkan pada kegiatan dan pelaksanaan *yadnya-yadnya* atau benda yang tidak diperuntukkan upacara agama. Benda-benda yang dimaksud diantaranya dapat dikwalifikasikan sebagai berikut:

- a. Benda-benda bergerak seperti uang, perhiasan-perhiasan, perabotan rumah tangga dan lain-lain.
- b. Hak atas hasil sawah ataupun kebun (hasil bumi lainnya).
- c. Hak atas rumah atau pekarangan (kecuali karang desa).

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bendesa adat Banjar Tuka Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara I Wayan Dana menyatakan bahwa terhadap benda-benda yang disebutkan diatas dapat dilekatkan hak milik kepada ahli warisnya dalam artian dapat dipindah tangankan. Benda bergerak itu dikecualikan terhadap harta benda yang erat kaitannya dengan upacara keagamaan.

Sebagaimana seperti apa yang telah disebutkan di atas bahwa semua harta benda warisan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris adalah menjadi bagian atau diperuntukkan kepada semua ahli waris. Di Bali harta warisan yang tidak dapat dibagi diantaranya adalah alat-alat upacara di *Sanggah* (Pura) *Dadia* (keluarga) seperti:

- "*Siwa Krama*" Tembok Pembatas dan lain-lainnya
- Keris Pangentas
- Senjata-senjata milik keluarga yang sering merupakan benda-benda suci dan keramat (benda-benda upacara)
- Tanah bukti pemerajan laba pura yang hakekatnya tidak dipisahkan dari benda-benda pusaka di atas untuk kepentingan upacara-upacara dan pemeliharaan.

Kalau dikaji permasalahan terhadap seseorang yang beralih agama yang tidak mendapat harta warisan adalah adil. Sebab para ahli waris yang beralih agama berarti sudah melepaskan kewajibannya kepada leluhur. Konsekwensi terhadap haknya sebagai ahli waris juga seketika itu lenyap. Semasih mereka memeluk agama Hindu para ahli waris tidak luput dari kewajiban terhadap leluhur mereka, sebagai konsekwensi ajaran agama Hindu yang disebut *Panca Srada*. *Panca Srada* adalah upacara yang didasarkan kepada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, *Atman* atau Roh Leluhur. *Karma Phala* atau baik buruknya perbuatan manusia.

Samsara atau *Punarbawa* yaitu kelahiran yang berulang-ulang dan *Moksa* yaitu kesempurnaan hidup di dunia dan di surga.

Di dalam upacara keagamaan di Bali, harta pusaka yang mempunyai nilai magis religius atau harta benda lain yang diperuntukkan untuk tujuan pelaksanaan keagamaan satu sama lain saling erat keterkaitannya dan tidak bisa dibagi sebagai harta warisan. Namun demikian apabila orang tua sebagai pewaris menginginkan untuk memberikan bagian kepada anaknya yang berpindah agama, ia dapat memberikan harta benda pemberian yang disebut "Jiwa Dana".

Ahli waris yang berpindah agama dari agama Hindu Bali ke agama lain yang diyakini dan dipercayai, dalam masyarakat adat Bali yang mayoritas pendudukan agama Hindu, tentu saja akan menimbulkan konsekwensi terhadap tanggung jawab dan kewajiban dalam masyarakat. Keterkaitan agama Hindu di Bali dengan adat setempat adalah merupakan satu kesatuan yang sulit untuk dipisahkan antara adat dan agama itu sendiri.

Berdasarkan data yang diperoleh, menurut pendapat Kepala Desa Dalung Drh. I Nyoman Triasa adalah sudah wajar terhadap mereka yang beralih agama, dari agama Hindu ke agama lainnya yang diyakininya tidak lagi mendapat sebagian warisan. Karena dalam pembagian waris selalu mempunyai kaitan yang erat dengan hak beserta kewajibannya. Menurut ajaran agama Hindu bahwa

tanggung jawab seorang anak (khususnya yang berstatus purusa) terhadap orang tua tidak saja menyangkut tanggung jawab kebendaan pada waktu orang tua masih hidup. Kewajibannya adalah melaksanakan upacara terhadap leluhur seperti melakukan pengabenan sampai arwah leluhur menjadi bersih dan mendapat tempat yang layak. Tanggung jawab terhadap *tetagenan* – *tetegenan* seperti tanggung jawab terhadap *merajan*, *pura* (tempat persembahyangan), yang menjadi tanggung jawab keluarga yang bersangkutan. Hal ini senada dengan pandangan dari I Gde Pudja yang menyatakan bahwa meninggalkan agama leluhur dianggap juga sebagai lenyapnya kedudukan mereka sebagai ahli waris. Akibat dari meninggalkan agama yang dianutnya, jelas mereka tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya sebagai anak atau putra terhadap leluhurnya. Oleh karena itu maka haknya sebagai ahli waris akan hilang³³.

Berdasarkan keterangan di Kelihan Banjar Dinas I Ketut Heru Haryono, kasus yang terjadi di Banjar Untal-untal, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, sesuai dengan judul yang diangkat yaitu akibat hukum ahli waris yang berpindah agama dari pewaris dalam pewarisan menurut hukum adat Bali adalah keluarga dari Ketut Sumayuda.

³³ Gede Pudja, *Op Cit*, hlm. 97.

Contoh Kasus 1 :

Ketut Sumayuda mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu I Wayan Adi Kusuma, I Made Jaya Kusuma, I Nyoman Ratna Juwita, Ketut Rima Juwita, Wayan Maya Juwita, dan Made Dana Kusuma. Setelah anak-anak dari Ketut Sumayuda dewasa, ternyata anak pertama dari Ketut Sumayuda yaitu I Wayan Adi Kusuma berpindah agama dari agama Hindu ke agama Kristen. Terhadap anak dari Ketut Sumayuda yang telah berpindah agama ini, Ketut Sumayuda berdasarkan kesepakatan yang diadakan bersama anak-anaknya yang lain telah memberikan tanah seluas 4 (empat) are kepada I Wayan Adi Kusuma tersebut. Dimana hasil kesepakatan yang telah di capai oleh keluarga Ketut Sumayuda selain memberikan tanah pekarangan seluas 4 (empat) are tersebut juga menyepakati bahwa terhadap I Wayan Adi Kusuma diberikan juga kewajiban-kewajiban kepadanya. Adapun kewajiban-kewajibannya antara lain:

1. Tetap memberikan sumbangan/bantuan apabila diperlukan untuk kepentingan upacara di rumah
2. Apabila terdapat hutang yang ditinggalkan oleh Ketut Sumayuda, maka ia wajib untuk ikut melunasi hutang yang ada tersebut.

Selain mendapatkan hak dan kewajibannya tersebut, berdasarkan hasil wawancara dengan Ketut Sumayuda maka perpindahan agama yang dilakukan anaknya tersebut membawa konsekwensi bahwa I Wayan Adi Kusuma tidak dapat mewaris

harta pusaka yang ada di keluarga tersebut, serta putus hubungan dengan urusan adat (Hindu) yang ada di desa tersebut. Di mana pada saat pemberian warisan tersebut juga dihadiri oleh Klian Adat dan Klian Dinas dari Banjar Untal-untal tersebut.

Berdasarkan keterangan yang didapat dari Ketut Sumayuda beserta Made Dana Kusuma yang ada pada saat wawancara, pemberian yang diberikan kepada I Wayan Adi Kusuma tersebut didasari karena I Wayan Adi Kusuma tersebut adalah merupakan anak kandung dari Ketut Sumayuda, dimana menurut pendapat mereka maka sudah selayaknya seorang anak kandung mendapatkan juga bagian yang sama seperti juga saudaranya yang lain yang tetap memeluk agama Hindu (Wawancara kediaman Keluarga Ketut Sumayuda, banjar Untal-untal, dalung, Pukul 17.00-18.15 WITA).

Sesuai dengan petunjuk dan saran dari Klian Dinas Banjar Untal-untal Dalung, penelitian dilakukan di keluarga yang salah satu anggota keluarganya sampai saat ini masih tetap beragama Hindu.

Contoh kasus 2:

Pan Kodri adalah warga Banjar Untal-untal yang mempunyai saudara bernama Wayan Mustika, Nyoman Silib, Ketut Gana, Luh Widep, Made Niani, Ketut Wartu, dan Luh Merani. Adapun orang tua mereka adalah I Wayan Puguh dan I

Made Keplos Perris yang sudah meninggal. Sampai saat ini Pan Kondri tersebut masih tetap beragama Hindu, sementara saudara-saudaranya yang lain telah berpindah agama (Kristen) sesuai dengan kepercayaan yang diyakininya. Berdasarkan keterangan yang di dapat dari Pan Kondri maka pada waktu orang tua mereka telah meninggal dunia, telah diadakan pembagian warisan berupa tanah/ sawah dengan jumlah luas yang sama yaitu masing-masing mendapat 5 (lima) are. Akan tetapi kepada Pan Kondri yang masih tetap memeluk agama Hindu, maka ia mendapatkan tanah seluas 10 (sepuluh) are yang merupakan tanah pelaba pura/meraja di keluarganya/ keluarga asalnya, dimana hasil dari tanah tersebut digunakan untuk mengupacarai kegiatan-kegiatan dari merajan keluarga asal tersebut. Selain itu terhadap para ahli waris yang telah berpindah agama juga tidak mendapatkan harta pusaka yang terkait dengan kepentingan upacara pada keluarga itu.

Di Banjar Untal-untal dan Banjar Tuka Desa Dalung terhadap anggota banjar yang berpindah agama dari agama Hindu ke agama Kristen bahwa warga Protestan dan warga Katolik tetap menjadi anggota banjar suka-duka maupun satu banjar dinas dengan krama banjar yang beragama Hindu dengan pengaturan sebagai berikut:

- a) Krama banjar yang beragama Hindu dikenakan peson-peson yaitu kewajiban-kewajiban atau pengeluaran, sedangkan

warga Protestan dan Katolik dikenakan sumbangan menurut kemampuan.

- b) Dalam menangani pekerjaan (mengambil pekerjaan dalam hal upacara adat maka mereka yang beragama Kristen pun ikut menanganinya (ngayah). Dalam hal adanya piodalan di tugu banjar, maka piodalan itu dilaksanakan oleh warga (krama) banjar yang beragama Hindu, sedangkan bagi krama yang beragama Kristen, mereka menyumbang sesuai dengan kemampuan.
- c) Bila ada salah seorang anggota yang meninggal maka warga yang beragama Kristen pun datang menengok (majenukan) dengan tanpa diberi tahu, demikian pula sebaliknya, jika ada warga Kristen yang meninggal maka *prayacita* di banjar diselenggarakan oleh yang beragama Hindu. Dalam hal ada kematian, kentongan (kul-kul) dibunyikan dan digerejapun dibunyikan.

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dan penjelasan-penjelasan dari responden. Apabila pembagian waris dilakukan sebelum ahli waris berpindah agama atau ahli waris berpindah agama setelah pewaris meninggal/setelah upacara pengabenan, bagian warisan yang sudah diterima tersebut tidaklah dipersoalkan oleh pihak keluarga yang lain. Pihak keluarga yang masih beragama Hindu (seagama dengan pewaris) tidak akan

meminta ahli waris tersebut mengembalikan harta warisan yang sudah diterima. Di dalam melaksanakan rangkaian upacara pengabenan kepada leluhur pada umumnya mereka yang beralih agama itupun diajak ikut serta dalam berunding atau musyawarah dalam melaksanakan pekerjaan atau upacara yang akan dilaksanakan dan menyumbang menurut kemampuan masing-masing. Hanya dalam menyelesaikan upacara menurut agama mereka tidak ikut.

4.2.2. Tanggung Jawab Ahli Waris yang Berpindah Agama dalam Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Bali

Seorang ahli waris atau anak, terutama anak yang mempunyai hak untuk mewaris atau di dalam hubungan ini anak-anak yang tidak terputus haknya untuk mewaris akan mewarisi harta peninggalan orang tuanya yang meninggalkan harta warisan. Seorang anak tidaklah terlepas dari kewajiban untuk dapat menempati kedudukan sebagai ahli waris yang tidak terputus haknya dalam mewaris. Telah dijelaskan seorang yang dapat dikatakan sebagai ahli waris maka ia harus memenuhi syarat-syarat dan kewajiban tertentu sehingga ia berhak untuk mewaris. Menurut hukum adat waris Bali, seseorang untuk dapat menduduki kedudukan sebagai ahli waris diantaranya harus memenuhi kewajiban-kewajiban dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- Merupakan anak-anak kandung (laki-laki) dari perkawinan yang sah, baik yang sudah lahir maupun yang masih dalam kandungan.
- Anak laki-laki yang masih tetap memeluk agama yang sama dengan orang tuanya.

Susunan kekeluargaan di Bali adalah Patrilineal dan bersumber pada agama Hindu. Seorang ahli waris diharapkan masih tetap memeluk agama yang sama dengan pewaris. Hal ini merupakan suatu pandangan bahwa seorang anak tetap melaksanakan kewajiban atau *swadharma* sebagai anak kepada orangtuanya.

Menurut I Ketut Soebandi dalam bukunya "Berbakti kepada Kawitan Leluhur adalah Paramo Brahman" mengatakan bahwa:

"Menurut filsafat masyarakat Bali seseorang yang menjalankan Putra Sesana yaitu menjalankan Swadharma seorang anak terhadap orang tua, maka orang tua akan dapat menikmati kehidupan dimasa tuanya nanti dan akan mensejahterakan arwah leluhurnya di alam baka"³⁴

Seseorang yang berpindah agama menurut hukum waris adat Bali dan hukum kekeluargaan patrilineal di Bali menunjukkan bahwa ia tidak ada lagi hubungannya dengan masalah penerusan dari ketentuan (silsilah keluarga) atau tidak sebagai penerima hak dan kewajiban dari pewaris. Setelah seseorang beralih agama, hubungan kekeluargaan yang masih ada adalah hubungan yang

menyangkut hubungan sentana waris. Dalam bahasa Bali disebut tidak ada lagi hubungan *makendang-kendang* karena seorang laki-laki yang telah beralih agama harus melakukan suatu upacara yang disebut *mepamit* di *sanggah* atau *merajan* keluarga asalnya yang berarti pada saat itu juga ia telah secara sadar dengan disaksikan oleh keluarga dan pihak-pihak dari pengurus adat telah melepaskan hak dan kewajibannya itu.

Hubungan anak dengan orang tua sebagai pewaris adalah semata hubungan darah secara biologis, dimana orang tua yang melahirkan anak. Oleh karena itu hubungan antara anak yang berpindah agama dengan orang tuanya kendatipun melaksanakan kewajiban terhadap orang tuanya adalah dalam rangka melaksanakan kewajiban moral saja. Sehingga dapat dikatakan, seorang ahli waris (laki-laki) berdasarkan hukum adat waris Bali dan hukum kekeluargaan, hanya terbatas pada hubungan darah dan hubungan moral saja.

Di dalam masyarakat Bali seorang ahli waris yang berpindah agama dari pewaris, adalah bukan sebagai ahli waris lagi. Hak dari ahli waris yang berpindah agama ini, menjadi hilang sejak ia berpindah agama. Hubungan darah antara orang tua dan anak adalah tidak dapat dipisahkan. Sedangkan hak dan kewajiban hukum seorang anak yang beralih agama dari pewaris sudah tidak

³⁴ Soebandi, *Berbakti Kepada Kawitan Leluhur Adalah Paramo Brahman*, Percetakan Kayumas, Denpasar, 1985, hlm.9.

ada lagi. Dalam hal pewarisan dan dalam lingkungan masyarakat adat, ahli waris tidak berpindah agama tidak mempunyai hak dan kewajiban lagi. Terhadap harta kekayaan pewaris, ahli waris yang berpindah agama hanya dapat diberikan harta berupa bekal, hadiah-hadiah ataupun hibah dari harta gono-gini atau *gonakaya* pewaris.

4.3. Macam-macam dan alasan Pemberian Harta Warisan yang Bagi

Pewaris yang berpindah Agama

Berdasarkan keterangan dari Ketut Sumayuda di atas, maka dapat kita lihat pemberian harta warisan kepada anaknya yang bernama I Wayan Adi Kusuma tersebut adalah berupa tanah pekarangan seluas 4 (empat) are. Di mana pemberian tanah pekarangan kepada I wayan Adi Kusuma itu, adalah berdasarkan kesepakatan diantara anggota keluarga Ketut Sumayuda yang didasari karena I Wayan Adi Kusuma tersebut adalah anak kandung yang sah dari Ketut Sumayuda, dan terhadap pemberian yang dilakukan secara musyawarah dengan dihadiri oleh Klian Adat dan Klian Dinas Banjar Untal-untal. Semua saudara kandung dari I Wayan Adi Kusuma merasa tidak keberatan, akan tetapi berdasarkan kesepakatan diantara mereka maka I Wayan Adi Kusuma hanya berhak mendapat bagian harta warisan hanya berupa tanah seluas 4 (empat) are tersebut. Sedangkan terhadap harta warisan yang lainnya seperti halnya harta pusaka yang ada, maka I Wayan adi Kusuma

tersebut dinyatakan/tidak berhak lagi, ini sebagai konsekwensi dari perpindahan agama yang telah dilakukannya.

Berdasarkan keterangan (contoh kasus 2) dari pan Kondri yang sampai saat ini masih tetap memeluk agama Hindu, seperti uraian di atas maka dapat kita lihat bahwa kepadanya diberikan bagian harta warisan dari orang tuanya berupa tanah seluas 10 (sepuluh) are, serta harta pusaka yang ada di keluarga tersebut berupa sanggah atau merajan serta sarana kelengkapan upacara keagamaan untuk sanggah atau merajan dikeluarkannya. Sedangkan saudara kandung Pan Kondri hanya mendapat bagian harta warisan sebanyak 5 (lima) are dan tidak mendapatkan bagian harta pusaka yang ada dikeluarkannya.

Berdasarkan keterangan dari Pan Kondri perbedaan luas tanah warisan (5 are) tersebut disebabkan karena dari 10 (sepuluh) are tanah tersebut, 5 (lima) are adalah merupakan tanah *Pelaba Pura*, dimana hasil yang di dapat dari tanah tersebut digunakan untuk membiayai segala keperluan (upacara) di *sanggah/ merajan* keluarga tersebut. Sehingga terhadap saudara kandung dari Pan Kondri tidak lagi dikenai *punia* (sumbangan) untuk kegiatan upacara di *sanggah/ merajan* keluarga asalnya dan kepada mereka dibebaskan dari kewajiban-kewajiban yang lainnya yang terkait dengan kegiatan upacara di *sanggah* tersebut.

Di dalam Hukum Waris Adat Bali, harta warisan dapat di bedakan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu:

1. Harta bawaan, yaitu harta yang dibawa suami istri kedalam perkawinan sebagai bekal ke dalam perkawinan yang bebas dan berdiri sendiri
Harta bawaan menurut hukum waris adat Bali, dibedakan atas:
 - a. Harta Guna Kaya, yaitu harta yang diperoleh suami istri masing-masing sebelum masuk ke jenjang perkawinan
 - b. Harta jiwa dana, yaitu pemberian secara tulus ikhlas dari orang tua kepada anaknya baik laki-laki maupun perempuan sebelum masuk perkawinan
 - c. Harta tetadaan, yaitu pemberian kepada anak perempuan pada waktu perkawinan dilangsungkan.
2. Harta bersama, adalah semua pendapatan atau penghasilan suami istri selama perkawinan selain harta asal dan atau harta pemberian yang juga disebut dengan *Druwe garbo*.
3. Harta pusaka, yaitu harta yang mempunyai nilai-nilai magis religius seperti sanggah dan merajan maupun barang-barang magis religius seperti laba pura, tanah druwe tengah serta barang-barang pusaka lainnya.

Berdasarkan keterangan dari kedua contoh kasus di atas, maka dapat kita lihat bahwa kepada ahli waris yang telah berpindah agama tersebut tidak ada yang mendapatkan bagian harta warisan berupa harta pusaka. Hal tersebut berdasarkan keterangan dari I Putu Gunawan, SPA sebagai Klian Adat Banjar Untal-untal dan I Made Parmita, S. Ag sebagai Bendesa Adat Dalung menyatakan bahwa harta pusaka itu tidak boleh di bagi-bagi karena sifat dan tujuannya adalah harta yang telah

disediakan untuk kepentingan. Misalnya untuk membangun pura, untuk membuat upacara keagamaan termasuk senjata seperti keris pusaka dan tombak pusaka. Harta tersebut dikuasai oleh satu atau beberapa anggota keluarga untuk kepentingan seluruh anggota keluarga.³⁵ Sedangkan menurut keterangan dari Bapak Drs. I Gusti Putu Rai Adyana selaku Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Denpasar bahwa harta pusaka yang terkait dengan urusan keagamaan tersebut hendaknya tidak di bagi-bagi atau diberikan kepada ahli waris yang berpindah agama karena hal tersebut di samping terkait dengan upacara di suatu sanggah atau merajan di keluarga asal hal tersebut juga terkait dengan *tetegenan* (Kewajiban adat/agama) dari para ahli waris yang tetap beragama Hindu yang sudah merupakan kewajiban mereka untuk melaksanakannya sebagai generasi penerus di keluarganya yang apabila tidak dilaksanakan akan menyebabkan atau membawa pengaruh yang tidak baik di dalam keluarga tersebut apabila hal tersebut tidak dilaksanakan

Adapun alasan pemberian harta warisan kepada ahli waris yang telah berpindah agama tersebut diserahkan kepada pewaris yang dilakukan berdasarkan kesepakatan melalui musyawarah mufakat di dalam keluarganya. Agar nantinya tidak menimbulkan suatu permasalahan di kemudian hari. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Wirjono

³⁵ Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.* hlm. 47.

(Wawancara dilakukan pada tanggal 30 Mei 2004 pukul 16.30-17.30 WITA dan tanggal 29 Mei 2004 pukul 15.00-16.15 WITA di rumah kediaman masing-masing).

(Wawancara dilakukan di Jalan Sutomo no. 2 Denpasar pukul 16.00-17.15 WITA).

Prodjodikoro yang menyatakan bahwa biasanya pemberian-pemberian ini tidak akan di cela oleh sanak-sanak keluarga yang tidak menerima pemberian itu. Oleh karena seorang pemilik barang kekayaan berhak dan leluasa untuk memberikan barang itu kepada siapapun juga. Bahkan tiada seorangpun berhak menghalang-halangi seorang pemilik barang melimparkan barang itu ke dalam laut.³⁶

Menurut pandangan dari Drs. I Ketut Suda Sugira selaku Ketua Forum Komunikasi antar Umat Beragama daerah Bali maka sudah sewajarnya kita sebagai umat beragama untuk tetap saling hormat menghormati demi menjaga kerukunan di mana terhadap alasan pemberian warisan terhadap ahli waris yang berpindah agama hendaknya dilaksanakan dengan dihadiri oleh perangkat desa sebagai saksi-saksi, dimana hal tersebut dimaksudkan untuk tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Di mana ditegaskan bahwa pembagian warisan tersebut telah dilakukan dan dapat diterima oleh semua pihak di mana mereka semua sepakat untuk menerima segala keputusan yang telah disepakati tersebut, dengan menyediakan pula bagian yang khusus untuk sanggah atau pemerajan untuk keperluan upacara. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Prof. Dr. I Nyoman Sirtha, SH., MS. Guru Besar di bidang hukum adat Universitas Udayana dikatakan bahwa, pemberian

³⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, hlm.64.
(Wawancara dilakukan pada tanggal 2 Juni 2004 pukul 09.30-10.30 WITA di Jalan Gunung Krinci I no. 1 Denpasar).

pembagian warisan tersebut terutama yang dilakukan oleh pewaris yang juga di sebut *Pedum Pamong* (pembagian dilakukan pada saat pewaris masih hidup dan disaksikan oleh perangkat desa) itu nantinya akan mampu memberi rasa keadilan diantara anggota keluarga mereka, sehingga yang sudah ada tetap terpelihara Dengan demikian berarti bahwa dalam hal pembagian waris yang dilakukan oleh suatu keluarga dalam masyarakat Bali hendaknya dihadiri oleh Perangkat Desa setempat sebagai saksi. Hal ini perlu dilakukan agar tidak menimbulkan persoalan dikemudian hari.

BAB V

KESIMPULAN

Setelah penyusun melakukan analisis dari hasil penelitian, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Secara yuridis akibat hukum dari ahli waris yang berpindah agama adalah bukan sebagai ahli waris lagi. Ahli waris yang sudah berpindah agama tidak berhak lagi atas harta warisan. Hak dan kewajiban seseorang yang berpindah agama (*aninggal kandang / aninggal kejaten*) secara hukum terhadap orang tua dan kerabatnya tidak ada lagi, hal tersebut terjadi ketika ahli waris tersebut melakukan upacara *mepamit* di *sanggah* keluarga asalnya untuk melepaskan hak dan kewajiban yang melekat padanya dikeluarkan asalnya tersebut.
2. Ahli waris yang berpindah agama menurut hukum waris adat Bali adalah: Mereka tidak mempunyai tanggung jawab terhadap kewajiban yang berkaitan dengan permasalahan agama (*Panca yadnya*) seperti upacara di Sanggah/Pamerajan dan upacara-upacara lainnya. Disamping itu mereka juga dibebaskan dari tanggung jawab terhadap aktivitas dalam Desa Adat seperti upacara di Pura Kahyangan Tiga, *Ngayah* (gotong royong) di lingkungan Desa Adat. Namun mereka tidak dibatasi dan mempunyai

tanggung jawab moral terhadap kelangsungan hidup orang tua mereka semasa hidupnya.

3. Seorang pewaris mempunyai kekuasaan yang mutlak atas harta warisanya tanpa ada campur tangan dari pihak lain.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Parisada dan organisasi Hindu lainnya termasuk juga prajuru adat sebagai pengurus desa agar secara kontinyuitas memberikan penyuluhan bagi umatnya. Tujuannya adalah agar diketahui hak dan kewajiban mereka setelah beralih agama.
2. Pengaturan sanksi dan akibat hukum dalam masyarakat hukum adat Bali, tentang perpindahan agama dalam hal pewarisan tidak diatur tegas. Maka *awig-awig* desa adat selayaknya mengatur tentang sanksi dan akibat hukumnya. Prajuru desa adat sebagai pengurus desa dalam penyusunan *awig-awig* mengatur lebih lengkap lagi tentang pewarisan beda agama ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Artadi I Ketut, 1981, *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya*, Cetakan Pertama, Penerbit CV. Mas Bal bekerja sama dengan Bagian Penerbit Fakultas Hukum Unud.
- Anwar Chairul *Hukum adat Indonesia*, Renika Cipta Jakarta 1997
- Atmaja Cok Gde, 1981, *Pengantar Hukum Kewarisan Adat Bali*, Staf LPPH (Lembaga Penyuluhan dan Pelayanan Hukum) Cabang Bali, Denpasar.
- Astiti, Tjokorde Istri Putra, 1984, *Laporan Penelitian tentang Unsur-unsur Agama yang Diterima sebagai Hukum Adat yang Diterima di Bali*, Penerbit Fakultas Hukum Unud, Denpasar.
- Beni I Wayan dan Sagung Ngurah, 1983, *Hukum Adat di Dalam Yurisprudensi Indonesia*, Surya Jaya, Denpasar.
- Hilman Hadikusuma, 1996, *Hukum Waris Indonesia Menurut : Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____ *Hukum Kekerabatan Adat* 1987, Fajar Agung Jakarta.
- Haar Ter, 1986, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Diterjemahkan oleh Soebekti Poesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Iman Sudiyat, 1981, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta.
- Koentjaraningrat, *Pokok-pokok Antropologi Sosial*, Penerbit Gramedia, Jakarta.
- Muhammad Bushar, *Pengantar Hukum Adat* 1990, Pradnya Paramita Bandung
- Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2002.
- Pitlo. A, 1982, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Penerbit PT. Intermasa, Jakarta.
- Pudja I Gde, 1977, *Hukum Kewarisan Hindu yang Diresipir ke Dalam Hukum Adat di Bali dan Lombok*, Cetakan I, Selekt Group, Jakarta.

- _____, 1978, *Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila dan Ajaran Agama Hindu Dharma*, Penerbit : Dirjen Bimas Hindu Budha Departemen Agama RI, Jakarta.
- Penetje, I Gede, 1986, *Aneka Catatan tentang Hukum Adat Bali*, Cetakan Pertama, CV. Kayumas, Denpasar.
- Soepomo, 1993, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, 1983, *Hukum Adat Indonesia*, Penerbit Rajawali, Jakarta.
- Soeripto K.R.M.H., 1973, *Beberapa Bab tentang Hukum Adat di Bali*, Fakultas Hukum Negeri Jember, Jember.
- Soebandi I Ketut, 1985, *Berbakti Kepada Kawitan Leluhur Adalah Paramo Brahman*, Fakultas Hukum Univ. Udayana, Bali.
- Soekanto, 1969, *Menjaga Hukum Adat Indonesia*, Penerbit Gunung Agung, Jakarta.
- _____, 1981, *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia*, Kunaisea Jakarta.
- Soemitro Hanitdjo Roni, 1990 *Metodologi Penelitian Hukum dan Yuridis*, Galia Indonesia Jakarta.
- Sugangga, 1995, *Hukum Waris Adat*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Suroyo Widnyodipuro, 1984, *Hukum Warisan di Indonesia*, Penerbit Gunung Agung, Cetakan, ke-8, Jakarta.
- _____, 1995, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Cetakan Keempat, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Prodjodikoro Wirjono, 1983, *Hukum Warisan di Indonesia*, Cetakan Ketujuh, Penerbit Sumur, Bandung.
- Poespanata Soebakti, 1985, *Asas-asas dan Susunan Hukum*, Pradnya Paramita Jakarta.

Peraturan

Undang-undang Dasar 1945.

Ketetapan MPR/IV/1999 tentang Garis-garis Besar Halian Negara.

Kitab Menawa Dharma Sastra.

Yurisprudensi Pengadilan Kertha (Pasuara 1900).

Awig-awig Desa Adat Untal-Untal.

Awig-awig Desa Adat Tuka.